



# PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA SURAKARTA 2014



disusun oleh

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KOTA SURAKARTA 2015



# Kata Pengantar

Terimakasih kami ucapkan untuk dukungan berbagai pihak sebagai penghimpun data, pengolah data, penyusun analisis, dan penyaji Penyusunan Buku Profil Kependudukan Kota Surakarta 2014.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta 2014 memberikan gambaran keadaan kependudukan kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2014. Gambaran kependudukan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi semua stakeholder yang membutuhkan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan secara umum untuk Kota Surakarta. Gambaran kondisi kependudukan Kota Surakarta dalam profil ini meliputi kuantitas, mobilitas dan persebaran penduduk.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Buku Profil Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2014 masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam data maupun bahasa, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang positif untuk kesempurnaan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Drs. Suwarta, SH, MM  
NIP. 19680324 199312 1 001



## **Tim penyusun**

### **Pembina**

Drs. Suwarta, SH, MM

### **Ketua Tim Penyusun**

Heny Ermawati, SH, M.Hum

### **Editor**

### **Layout dan cover**

Bambang Supriyadi, S.Kom



# Daftar isi

KATA PENGANTAR .....	i
TIM PENYUSUN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.....	1
B. Tujuan Penyusunan.....	1
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Pengertian umum Terhadap istilah yang digunakan dalam profil Perkembang- Kependudukan .....	2
E. Sistematika.....	4
BAB 2. GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA.....	6
A. Letak Geografis .....	6
B. Kondisi Demografis .....	6
C. Gambaran Ekonomi Daerah.....	7
D. Potensi Daerah.....	8
BAB 3. SUMBER DATA.....	11
BAB 4. PERKEMBANGAN KUANTITAS PENDUDUK.....	13
A. Jumlah dan Persebaran Penduduk .....	13
1. Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin.....	13
2. Kepadatan Penduduk .....	15
3. Laju Pertumbuhan Penduduk .....	17
B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi .....	18
1. Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin, <i>Piramida Penduduk, dan Rasio Ketergantungan</i> .....	18
2. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin.....	22
3. Profil Kependudukan dari Aspek Keluarga.....	25
4. Penduduk menurut karakteristik sosial.....	34
5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian.....	36
BAB 5. KUALITAS PENDUDUK .....	37
A. Aspek Kesehatan.....	37
B. Aspek Pendidikan.....	41
C. Aspek Ekonomi.....	43

D. Aspek Sosial .....	46
<b>BAB 6. PENERBITAN DAN KEPEMILIKAN.....</b>	<b>51</b>
1. Kepemilikan Kartu Keluarga.....	51
2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	53
3. Penerbitan dan Kepemilikan Akta .....	54
a. Akta Perkawinan.....	55
b. Akta Kelahiran .....	56
c. Akta Perceraian.....	57
d. Akta Kematian .....	58
e. Pengakuan, Pengesahan Dan Pengangkatan Anak Dan Penting Peristiwa Penting Lainnya.....	59
<b>BAB 7. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan: Tantangan Profil Kependudukan Kota Surakarta bagi Pembangunan Kota Berwawasan Kependudukan.....	61
1. Aspek Kuantitas Penduduk.....	61
2. Aspek Kualitas .....	63
3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan .....	64
4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan.....	65
B. Implikasi Kebijakan.....	67
1. Kebijakan Akurasi dan Validasi Kependudukan .....	67
2. Kebijakan Pengarusutamaan Pemanfaatan Data Kependudukan.....	67
3. Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.....	68
4. Kebijakan Penataan Ruang Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kota Berwawasan Kependudukan.....	68
5. Kebijakan Ketahanan Pangan.....	68
6. Kebijakan Kesehatan .....	69
7. Kebijakan Pendidikan .....	69
8. Kebijakan Ketenagakerjaan .....	69
9. Kebijakan Sosial .....	69

## Lampiran

# Daftar Tabel

Tabel II. 1. Perkembangan PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surakarta Tahun 2008-2012.....	7
Tabel II. 2. Pembagian Kawasan Ekonomi Kota Surakarta.....	8
Tabel IV. 1. Jumlah, Proporsi, dan Distribusi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Wilayah.....	14
Tabel IV. 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Angka Pertambahan.....	15
Tabel IV. 3. Angka Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2014.....	17
Tabel IV. 4. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	18
Tabel IV. 5. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2014 .....	21
Tabel IV. 6. Jumlah Penduduk menurut Status Kawin di Kota Surakarta Tahun 2014.....	22
Tabel IV. 7. Distribusi Penduduk menurut Status Kawin dan Kecamatan .....	22
Tabel IV. 8. Angka Perkawinan Spesifik Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2014 .....	23
Tabel IV. 9. Angka Perceraian Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2014.....	24
Tabel IV. 10. Jumlah Penduduk menurut Kepala Keluarga di Kota Surakarta Tahun 2014.....	25
Tabel IV. 11. Jumlah Penduduk menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga .....	27
Tabel IV. 12. Jumlah Kepala Keluarga menurut Umur di Kota Surakarta Tahun 2014 .....	28
Tabel IV. 13. Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2014 .....	29
Tabel IV. 14. Jumlah Kepala Keluarga menurut Status Kawin..... di Kota Surakarta Tahun 2014.....	30
Tabel IV. 15. Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan .....	31
di Kota Surakarta Tahun 2014.....	31
Tabel IV. 16. Jumlah Kepala Keluarga menurut Status Kerja .....	di
di Kota Surakarta Tahun 2014.....	32
Tabel IV. 17. Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan .....	di
di Kota Surakarta Tahun 2014 .....	33
Tabel IV. 18. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan .....	di
di Kota Surakarta Tahun 2014.....	34



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

Pembangunan wilayah dilakukan untuk kesejahteraan penduduk wilayah tersebut. Aspek kependudukan secara fungsional membentuk satu kesatuan ekosistem wilayah. Oleh karena itu informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Peningkatan kualitas penduduk diposisikan sebagai indikator *outcome* dari semua program kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi yang dapat dikaji untuk kepentingan perencanaan pembangunan, pilihan prioritas pagu indikatif pembangunan, rencana tindak penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan model kelembagaan demokrasi.

### B. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Profil Perkembangan Data Kependudukan Kota Surakarta tahun 2014 bertujuan untuk menyajikan data dan memberikan informasi perkembangan kependudukan kota Surakarta tahun 2014, supaya dapat dimanfaatkan secara umum sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, penentuan target kinerja pembangunan, dan perencanaan tolok ukur kinerja pembangunan daerah. Secara khusus pemanfaatan informasi perkembangan kependudukan tahun 2014 untuk rujukan data:

- (1) Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kota
- (2) Perencanaan kebijakan kependudukan daerah
- (3) penentuan target kinerja luaran dan sasaran program pembangunan daerah terkait pengarusutamaan program pembangunan *pro poor*, *pro job*, dan *pro growth* dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan daerah.
- (4) Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial
- (5) pengembangan kelembagaan partisipasi pembangunan masyarakat

### C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2010, ruang lingkup profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta tahun 2014 memuat deskripsi data dan analisis implikasi atas data:

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk; jumlah komposisi dan persebaran penduduk; penduduk menurut karakteristik demografi;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk, menampilkan data mobilitas permanen (migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, migrasi bruto), mobilitas non permanen, dan urbanisasi (persentase penduduk kota; rasio kota dan desa ).
4. Kepemilikan dokumen kependudukan: kepemilikan KK, KTP, Akta (kelahiran; perkawinan; perceraian; kematian; pengakuan anak), surat dan keterangan orang terlantar.

Analisis data profil kependudukan kota Surakarta tahun 2014 menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi daerah dan implikasinya bagi perencanaan pembangunan daerah (target luaran, sasaran program) ; Perencanaan kebijakan kependudukan daerah; penentuan target kinerja luaran dan sasaran program pembangunan daerah; penentuan target kinerja luaran dan sasaran program pembangunan daerah terkait pengarusutamaan program pembangunan *pro poor*, *pro job*, dan *pro growth* dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan daerah; Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial; dan pengembangan kelembagaan partisipasi pembangunan masyarakat

### D. Pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di kota Surakarta.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk Kota Surakarta.
3. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Penyajian data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri

5. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
6. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal
11. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
12. **Mobilitas penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. **Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
14. **Mobilitas Penduduk Non Permanen (Circualtion/ Sirkuler)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik (commuting) dan menginap/mondok.
15. Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan

sedang mencari pekerja (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produksi

## E. Sistematika

Profil perkembangan kependudukan kota Surakarta tahun 2014 memuat:

1. Bab I. Pendahuluan memuat:

Latar belakang penyusunan, tujuan, ruang lingkup dan pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan

2. Bab II. Gambaran Umum Daerah memuat:

Letak geografis daerah, kondisi demografis daerah, gambaran ekonomi daerah dan potensi daerah.

3. Bab III. Sumber Data memuat:

Sumber data memuat penjelasan sumber data yang digunakan untuk menyusun Profil Perkembangan Kependudukan ini.

4. Bab IV. Perkembangan Kependudukan memuat:

a. Kuantitas Penduduk;

Kuantitas penduduk mendeskripsikan tentang:

(1) jumlah dan persebaran penduduk, meliputi: jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan/desa; kepadatan penduduk; laju pertumbuhan penduduk;

(2) penduduk menurut karakteristik demografi, meliputi:

(a) jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, yaitu rasio jenis kelamin, piramida penduduk, rasio ketergantungan;

(b) jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin, meliputi: angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum, angka perkawinan menurut kelompok umur, rata-rata umur kawin pertama, angka perceraian kasar, angka perceraian umum.

(c) keluarga, meliputi: jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga; hubungan dengan kepala keluarga; karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur; karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin; karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin; karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan; karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.

(d) Penduduk menurut karakteristik sosial, meliputi: jumlah penduduk menurut pendidikan; jumlah penduduk menurut agama; jumlah penduduk menurut kecacatan.

- (e) Kelahiran, meliputi: jumlah kelahiran; angka kelahiran kasar.
    - (f) Kematian, meliputi: jumlah kematian; angka kematian kasar.
- 5. Bab V. Kualitas Penduduk; meliputi:
  - a. Kesehatan, dilihat dari kategori:
    - (1) Kelahiran, yaitu: angka kelahiran menurut umur; angka kelahiran total; rasio anak perempuan.
    - (2) Kematian, yaitu: angka kematian bayi; angka kematian Neonatal; angka kematian post Neonatal; angka kematian balita; angka kematian ibu.
  - b. Pendidikan, dilihat dari indikator: angka melek huruf; angka partisipasi kasar; angka partisipasi murni; angka penduduk putus sekolah.
  - c. Ekonomi, dilihat dari:
    - (1) proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja, yaitu: jumlah dan proporsi tenaga kerja, jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan menganggur
    - (2) angka partisipasi angkatan kerja
    - (3) jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan
  - d. Sosial, dilihat dari: jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang cacat
  - e. Mobilitas penduduk, meliputi:
    - (1) mobilitas permanen
    - (2) mobilitas non permanen
- 6. Bab VI. Penerbitan dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
  - a. Kepemilikan kartu keluarga
  - b. Kepemilikan kartu tanda penduduk
  - c. Penerbitan dan Kepemilikan Akta: Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Kematian, Pengakuan, Pengesahan Dan Pengangkatan Anak Dan Peristiwa Penting Lainnya
- 7. Bab VII. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi daerah berdasarkan telaahan dan analisis untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

### A. Letak Geografis

Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,06 Km<sup>2</sup> dan secara administrasi terbagi menjadi 5 (lima) wilayah administrasi kecamatan, 51 kelurahan, 602 Rukun Warga (RW) dan 2.708 Rukun Tetangga (RT).

Perbatasan administrasi wilayah Kota Surakarta, menurut RTRW Kota Surakarta 2007-2026 adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Boyolali

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35 " Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan.

Surakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian ±95 m dpl, dengan luas 44,1 km<sup>2</sup> (0,14 % dari luas Jawa Tengah). Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang, di antara Gunung Merapi (tinggi 3115 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karena dilalui oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, dengan beberapa anak sungainya.

### B. Kondisi Demografis

Berdasarkan DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kota Surakarta pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk adalah 552,650 jiwa, terdiri dari 273,038 laki-laki dan 279,612 perempuan. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah dan ke-8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke-13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia. Kepadatan penduduk cukup tinggi yaitu mencapai 12.390 jiwa/km<sup>2</sup>, sehingga jika laju penambahan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Surakarta akan menjadi semakin padat.

Jika merujuk pada BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, kota Surakarta termasuk tiga besar kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah, dibawah di rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (1,92). Rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta diperkirakan sebagai akibat perkembangan Kota Surakarta yang cukup pesat dan ruang pengembangan di dalam kota sudah jenuh, sehingga terjadi perpindahan penduduk ke kawasan pinggiran di luar wilayah Kota Surakarta. Permukiman yang ada di kawasan pusat kota berangsur berubah menjadi kegiatan perdagangan dan jasa.

Penduduk Kota Surakarta tergolong majemuk, selain dihuni oleh suku Jawa, ada banyak pula penduduk beretnis Tionghoa, dan Arab yang tinggal di Surakarta. Perkampungan Arab menempati tiga wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Pasar Kliwon, Semanggi dan Kedung Lumbu di Kecamatan Pasar Kliwon. Penempatan kampung Arab secara berkelompok tersebut sudah diatur sejak zaman dulu untuk mempermudah pengurusan bagi etnis asing di Surakarta dan demi terwujudnya ketertiban dan keamanan. Sementara itu perkampungan Tionghoa banyak terfokus di wilayah Balong, Coyudan, dan Keprabon.

### C. Gambaran Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu.

**Tabel II. 1. Perkembangan PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surakarta Tahun 2008-2012**

Sektor	2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp (juta)	%								
Pertanian	2.866,18	0,06	2.900,41	0,06	2.908,82	0,06	2.911,03	0,05	2.912,43	0,05
Pertambangan dan penggalian	1.905,23	0,04	1.862,50	0,04	1.832,36	0,04	1.809,03	0,03	1.789,64	0,03
<b>Primer</b>	<b>4.771,41</b>	<b>0,10</b>	<b>4.762,91</b>	<b>0,10</b>	<b>4.741,18</b>	<b>0,09</b>	<b>4.720,06</b>	<b>0,09</b>	<b>4.702,07</b>	<b>0,08</b>
Industri pengolahan	1.200.606,83	26,39	1.235.952,77	25,65	1.277.210,09	25,02	1.312.945,81	24,26	1.349.967,23	23,51
Listrik, Gas, dan Air Bersih	103.020,58	2,26	111.391,58	2,31	119.194,83	2,34	128.648,33	2,38	137.673,24	2,40
Konstruksi	583.069,88	12,82	625.624,26	12,99	671.926,81	13,17	717.165,29	13,25	765.569,54	13,33
<b>Sekunder</b>	<b>1.886.697,29</b>	<b>41,47</b>	<b>1.972.968,61</b>	<b>40,95</b>	<b>2.068.331,73</b>	<b>40,52</b>	<b>2.158.759,43</b>	<b>39,89</b>	<b>2.253.210,01</b>	<b>39,23</b>
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.211.208,49	26,62	1.288.066,95	26,74	1.367.808,36	26,80	1.466.845,97	27,10	1.569.512,38	27,33
Pengangkutan dan Komunikasi	449.973,94	9,89	484.827,89	10,06	514.407,73	10,08	549.760,87	10,16	585.690,23	10,20
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	449.992,44	9,89	481.987,12	10,00	518.980,77	10,17	567.860,94	10,49	615.432,99	10,72
Jasa-Jasa	546.699,38	12,02	585.264,16	12,15	629.616,47	12,34	663.965,04	12,27	714.313,62	12,44
<b>Tersier</b>	<b>2.657.874,25</b>	<b>58,42</b>	<b>2.840.146,12</b>	<b>58,95</b>	<b>3.030.813,33</b>	<b>59,38</b>	<b>3.248.432,82</b>	<b>60,02</b>	<b>3.484.949,22</b>	<b>60,68</b>
<b>PDRB</b>	<b>4.549.342,95</b>	<b>100,00</b>	<b>4.817.877,64</b>	<b>100,00</b>	<b>5.103.886,24</b>	<b>100,00</b>	<b>5.411.912,31</b>	<b>100,00</b>	<b>5.742.861,30</b>	<b>100,00</b>
Penduduk pertengahan tahun	522.935		528.202		499.337		501.650		500.328	
<b>Pendapatan per kapita</b>	<b>8,7</b>		<b>9,1</b>		<b>10,2</b>		<b>10,8</b>		<b>11,5</b>	

Sumber: BPS Kota Surakarta Tahun 2013

Pemahaman sektor andalan adalah sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Berdasarkan data perkembangan PDRB per sektor, dapat dihitung besarnya (proporsi) kontribusi masing-masing sektor. Distribusi PDRB andalan berada pada Sektor

Perdagangan, Sektor Industri, Hotel dan Restoran, Sektor Konstruksi (Bangunan), Sektor Jasa-Jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

#### D. Potensi Daerah

Gambaran pembagian kawasan ekonomi menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2006-2026, sebagai berikut.

Tabel II. 2. Pembagian Kawasan Ekonomi Kota Surakarta

Kawasan	Peruntukan	Wilayah
Kawasan industri rumah tangga	industri rumah tangga mebel	di Kecamatan Jebres
	industri rumah tangga pembuatan <i>shuttle cock</i> dan gitar	di Kecamatan Pasarkliwon
	industri pengolahan tahu dan tempe	di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres
	industri pembuatan sangkar burung	di Kelurahan Mojosongo dan Kecamatan Jebres
Kawasan industri kreatif	industri batik	di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan
Kawasan pariwisata	cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional	di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasarkliwon.
	wisata belanja batik;	di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan
	wisata barang antik.	di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari
	pariwisata kuliner	lokasinya tersebar di seluruh wilayah kota
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, meliputi: Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.	pasar tradisional,	Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Panjang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Manahan, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Pasarkliwon
	Pusat perbelanjaan meliputi pengembangan perdagangan skala regional kota	Kelurahan Stabelan-Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasarkliwon dan Kelurahan Panularan-
	perdagangan grosir dan pasar besar	Kecamatan Laweyan
	pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko	di sepanjang jalan protokol
	toko modern berupa pengembangan	di wilayah kota yang

Kawasan	Peruntukan	Wilayah
	pusat perbelanjaan dan toko modern	penempatannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal	ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokan PKL oleh Pemerintah Daerah	Kawasan I yaitu di Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Keratonan dan Kelurahan Sriwedari-Kecamatan Pasarkliwon; Kawasan II yaitu di Kelurahan Purwosari-Kecamatan Laweyan; Kawasan V yaitu di Kelurahan Jebres dan Kelurahan Purwodiningratan-Kecamatan Jebres; Kawasan VI yaitu di Kelurahan Manahan, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Nusukan-Kecamatan Banjarsari
	ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari <i>Coorporate Social Responsibility (CSR)</i>	
	ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta sebagai pasar malam ( <i>night market</i> )	di Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011-2031

Industri batik menjadi salah satu industri khas Solo. Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. Selain Pasar Klewer, Solo juga memiliki banyak pasar tradisional, di antaranya Pasar Gedhe (Pasar Besar), Pasar Legi, dan Pasar Kembang, Pasar Sangkrah.

Selain itu ada pula pasar barang antik yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pasar Triwindu/Windu Jenar (setiap Sabtu malam diubah menjadi Pasar Ngarsopuro) serta Pasar Keris dan Cenderamata Alun-Alun Utara Keraton Solo.

Pusat bisnis kota Solo terletak di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran internasional, hingga tujuan wisata dan hiburan terletak di sepanjang jalan protokol ini. Beberapa mal modern di Solo antara lain Solo Square, Solo Grand Mall (SGM), Solo Paragon, Solo Center Point (SCP), Singosaren Plaza, Pusat Grosir Solo (PGS), Beteng Trade Center (BTC), Pusat Perbelanjaan Luwes (Ratu Luwes, Sami Luwes, Luwes Sangkrah, Luwes Gading, Luwes Nusukan, Luwes Mojosongo, Luwes Palur).

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011-2031, penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, yaitu kawasan terpadu yang meliputi :

- a. Koridor Jalan Jend. Gatot Subroto dan sebagian ruas Jalan dr. Rajiman (Coyudan) Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan; dan
- b. Koridor rencana jalan lingkar Utara yang melewati Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Banyuanyar-Kecamatan Banjarsari.



# BAB III

## SUMBER DATA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan menyebutkan bahwa data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari registrasi, non registrasi; dan lintas sektor.

Data hasil registrasi penduduk bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Data dari lintas sektor sebagaimana diperoleh dari sektor lain yang terkait, seperti dinas yang menangani urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketenagakerjaan, dan urusan sosial. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk, dan variabel mobilitas penduduk.

Variabel Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal. Sedangkan Variabel Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Variabel Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Hal ini berarti publikasi Profil Perkembangan Kependudukan didasarkan pada DAK2 (Data Agregat Kependudukan Kecamatan) dari Kementerian Dalam Negeri, yang diterbitkan 2 kali dalam satu tahun. Jika terjadi perbedaan data antara DAK2 dengan data di daerah, maka data DAK2 yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negara yang dijadikan data resmi.

Metodologi analisis data dan penyajian perkembangan kependudukan Kota Surakarta tahun 2014 didasarkan pada kerangka pikir penyusunan profil perkembangan kependudukan ini mencakup lima hal pokok, yaitu:

1. Menyajikan perkembangan profil secara kuantitatif sehingga tampak jelas apa yang sudah berlangsung;
2. Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan sehingga berkualitas;
3. Dari point 1 dan 2 teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan asset pembangunan daerah dan nasional;
4. Mendiseminasikan hasil analissi profil kependudukan kota Surakarta dengan instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Dinas Sosial Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Sekretariat daerah, untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
5. Mendorong percepatan terwujudnya database penduduk dan analisa untuk pembangunan daerah.



## BAB IV

# PERKEMBANGAN KUANTITAS PENDUDUK

Bab ini akan mendiskripsikan dan menganalisis perkembangan kuantitas penduduk Kota Surakarta tahun 2014, mencakup tentang:

1. Jumlah dan persebaran penduduk, meliputi: jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan/kelurahan; kepadatan penduduk; laju pertumbuhan penduduk;
2. Penduduk menurut karakteristik demografi, meliputi:
  - (a) Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, yaitu rasio jenis kelamin, piramida penduduk, rasio ketergantungan;
  - (b) Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin, meliputi: angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum, angka perkawinan menurut kelompok umur, rata-rata umur kawin pertama, angka perceraian kasar, angka perceraian umum.
  - (c) Keluarga, meliputi: jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga; hubungan dengan kepala keluarga; karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur; karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin; karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin; karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan; karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.
  - (d) Penduduk menurut karakteristik sosial, meliputi: jumlah penduduk menurut pendidikan; pendidikan tertinggi yang ditamatkan; jumlah penduduk menurut agama; jumlah penduduk menurut kecatata.
  - (e) Kelahiran, meliputi: jumlah kelahiran; angka kelahiran kasar.
  - (f) Kematian, meliputi: jumlah kematian; angka kematian kasar.

### A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

#### 1. Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin

Kota Surakarta dengan luas 44,06 Km<sup>2</sup> didiami penduduk sebanyak 552.650 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan. Penyebaran jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut.

**Tabel IV. 1. Jumlah, Proporsi, dan Distribusi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Di Kota Surakarta Tahun 2014**

KELURAHAN	Laki-laki		Perempuan		L + P		RJK
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
Kec.LAWEYAN	48.081	49,1%	49.909	50,9%	97.990	17,7%	96,34%
PAJANG	11.768	49,4%	12.048	50,6%	23.816	4,3%	97,68%
LAWEYAN	1.024	50,0%	1.022	50,0%	2.046	0,4%	100,20%
BUMI	2.946	48,8%	3.091	51,2%	6.037	1,1%	95,31%
PANULARAN	4.385	48,6%	4.631	51,4%	9.016	1,6%	94,69%
PENUMPING	1.917	48,5%	2.036	51,5%	3.953	0,7%	94,16%
SRIWEDARI	2.009	48,6%	2.128	51,4%	4.137	0,7%	94,41%
PURWOSARI	4.935	49,0%	5.134	51,0%	10.069	1,8%	96,12%
SONDAKAN	5.728	48,7%	6.042	51,3%	11.770	2,1%	94,80%
KERTEN	4.497	49,5%	4.590	50,5%	9.087	1,6%	97,97%
JAJAR	4.353	49,5%	4.437	50,5%	8.790	1,6%	98,11%
KARANGASEM	4.519	48,8%	4.750	51,2%	9.269	1,7%	95,14%
Kec.SERENGAN	26.054	49,0%	27.081	51,0%	53.135	9,6%	96,21%
JOYOTAKAN	3.752	49,6%	3.810	50,4%	7.562	1,4%	98,48%
DANUKUSUMAN	4.903	48,9%	5.123	51,1%	10.026	1,8%	95,71%
SERENGAN	5.252	49,1%	5.439	50,9%	10.691	1,9%	96,56%
TIPES	5.831	49,4%	5.975	50,6%	11.806	2,1%	97,59%
KRATONAN	2.581	48,2%	2.771	51,8%	5.352	1,0%	93,14%
JAYENGAN	1.906	48,0%	2.063	52,0%	3.969	0,7%	92,39%
KEMLAYAN	1.829	49,0%	1.900	51,0%	3.729	0,7%	96,26%
Kec.PASAR KLIWON	41.762	49,7%	42.248	50,3%	84.010	15,2%	98,85%
JOYOSURAN	5.163	49,4%	5.293	50,6%	10.456	1,9%	97,54%
SEMANGGI	17.519	50,4%	17.271	49,6%	34.790	6,3%	101,44%
PASAR KLIWON	2.619	49,3%	2.697	50,7%	5.316	1,0%	97,11%
GAJAHAN	1.877	48,9%	1.960	51,1%	3.837	0,7%	95,77%
BALUWARTI	3.004	48,3%	3.212	51,7%	6.216	1,1%	93,52%
KAMPUNG BARU	1.457	48,3%	1.560	51,7%	3.017	0,5%	93,40%
KEDUNG LUMBU	2.625	49,1%	2.717	50,9%	5.342	1,0%	96,61%
SANGKRAH	6.276	50,0%	6.288	50,0%	12.564	2,3%	99,81%
KAUMAN	1.222	49,4%	1.250	50,6%	2.472	0,4%	97,76%
Kec.JEBRES	70.518	49,6%	71.618	50,4%	142.136	25,7%	98,46%
KEPATIHAN KULON	1.075	46,6%	1.230	53,4%	2.305	0,4%	87,40%
KEPATIHAN WETAN	1.199	47,8%	1.307	52,2%	2.506	0,5%	91,74%
SUDIROPRAJAN	1.829	48,0%	1.979	52,0%	3.808	0,7%	92,42%
GANDEKAN	4.661	49,7%	4.712	50,3%	9.373	1,7%	98,92%
SEWU	3.596	49,8%	3.632	50,2%	7.228	1,3%	99,01%
PUCANGSAWIT	6.765	50,0%	6.764	50,0%	13.529	2,4%	100,01%
JAGALAN	5.899	49,2%	6.083	50,8%	11.982	2,2%	96,98%
PURWODININGRATAN	2.399	48,8%	2.521	51,2%	4.920	0,9%	95,16%
TEGALHARJO	2.365	48,8%	2.479	51,2%	4.844	0,9%	95,40%
JEBRES	16.096	49,5%	16.422	50,5%	32.518	5,9%	98,01%
MOJOSONGO	24.634	50,1%	24.489	49,9%	49.123	8,9%	100,59%
Kec.BANJARSARI	86.623	49,4%	88.756	50,6%	175.379	31,7%	97,60%
KADIPIRO	26.718	49,9%	26.826	50,1%	53.544	9,7%	99,60%
NUSUKAN	15.245	49,5%	15.544	50,5%	30.789	5,6%	98,08%
GILINGAN	9.799	49,0%	10.211	51,0%	20.010	3,6%	95,97%
SETABELAN	1.939	49,5%	1.975	50,5%	3.914	0,7%	98,18%
KESTALAN	1.428	48,3%	1.527	51,7%	2.955	0,5%	93,52%

KELURAHAN	Laki-laki		Perempuan		L + P		RJK
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
KEPRABON	1.464	47,5%	1.621	52,5%	3.085	0,6%	90,31%
TIMURAN	1.293	46,9%	1.466	53,1%	2.759	0,5%	88,20%
KETELAN	1.658	49,2%	1.715	50,8%	3.373	0,6%	96,68%
PUNGGAWAN	1.987	47,9%	2.159	52,1%	4.146	0,8%	92,03%
MANGKUBUMEN	4.654	49,1%	4.822	50,9%	9.476	1,7%	96,52%
MANAHAN	5.101	48,9%	5.335	51,1%	10.436	1,9%	95,61%
SUMBER	8.652	49,5%	8.821	50,5%	17.473	3,2%	98,08%
BANYUANYAR	6.685	49,8%	6.734	50,2%	13.419	2,4%	99,27%
TOTAL	273.038	49,4%	279.612	50,6%	552.650		97,65%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tahun 2014, diolah.

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banjarsari sebesar 175.379 jiwa (31,7 %). Sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Serengan sebanyak 53.135 Jiwa (9,6%).

Rasio perempuan dibandingkan laki-laki terbanyak berada di wilayah Pasar Kliwon yaitu perempuan 50,3% dan laki-laki 49,7%. Informasi rasio jenis kelamin ini diperlukan untuk penyusunan rencana aksi kebijakan pemerintah daerah yang responsif gender.

## 2. Kepadatan Penduduk

Informasi kepadatan penduduk berguna untuk mengkaji daya tampung dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat dihasilkan kebijakan daerah yang *pro* keberlanjutan lingkungan yang sehat. Deskripsi kepadatan penduduk Kota Surakarta tahun 2014 sebagai berikut.

**Tabel IV. 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Angka Pertambahan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2014**

KELURAHAN	Jumlah Penduduk 2014 n (jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan
LAWEYAN	97.990	8,64	11.341
PAJANG	23.816	1,55	15.365
LAWEYAN	2.046	0,25	8.184
BUMI	6.037	0,37	16.316
PANULARAN	9.016	0,54	16.696
PENUMPING	3.953	0,5	7.906
SRIWEDARI	4.137	0,51	8.112
PURWOSARI	10.069	0,84	11.987
SONDAKAN	11.770	0,79	14.899
KERTEN	9.087	0,92	9.877
JAJAR	8.790	1,06	8.292
KARANGASEM	9.269	1,3	7.130
SERENGAN	53.135	3,19	16.657
JOYOTAKAN	7.562	0,46	16.439
DANUKUSUMAN	10.026	0,51	19.659
SERENGAN	10.691	0,64	16.705
TIPES	11.806	0,64	18.447
KRATONAN	5.352	0,32	16.725

KELURAHAN	Jumlah Penduduk 2014 n (jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan
JAYENGAN	3.969	0,29	13.686
KEMLAYAN	3.729	0,33	11.300
PASAR KLIWON	84.010	4,82	17.429
JOYOSURAN	10.456	0,54	19.363
SEMANGGI	34.790	1,67	20.832
PASAR KLIWON	5.316	0,36	14.767
GAJAHAN	3.837	0,34	11.285
BALUWARTI	6.216	0,41	15.161
KAMPUNG BARU	3.017	0,31	9.732
KEDUNG LUMBU	5.342	0,55	9.713
SANGKRAH	12.564	0,45	27.920
KAUMAN	2.472	0,19	13.011
JEBRES	142.136	12,58	11.299
KEPATIHAN KULON	2.305	0,18	12.806
KEPATIHAN WETAN	2.506	0,23	10.896
SUDIROPRAJAN	3.808	0,23	16.557
GANDEKAN	9.373	0,35	26.780
SEWU	7.228	0,49	14.751
PUCANGSAWIT	13.529	1,27	10.653
JAGALAN	11.982	0,65	18.434
PURWODININGRATAN	4.920	0,37	13.297
TEGALHARJO	4.844	0,33	14.679
JEBRES	32.518	3,17	10.258
MOJOSONGO	49.123	5,33	9.216
BANJARSARI	175.379	14,81	11.842
KADIPIRO	53.544	5,09	10.519
NUSUKAN	30.789	2,06	14.946
GILINGAN	20.010	1,27	15.756
SETABELAN	3.914	0,28	13.979
KESTALAN	2.955	0,21	14.071
KEPRABON	3.085	0,32	9.641
TIMURAN	2.759	0,32	8.622
KETELAN	3.373	0,25	13.492
PUNGGAWAN	4.146	0,36	11.517
MANGKUBUMEN	9.476	0,8	11.845
MANAHAN	10.436	1,28	8.153
SUMBER	17.473	1,33	13.138
BANYUANYAR	13.419	1,25	10.735
<b>TOTAL</b>	<b>552.650</b>	<b>44,04</b>	<b>12.549</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

Angka kepadatan penduduk kota Surakarta 12.549/ km<sup>2</sup>, artinya setiap Km<sup>2</sup> dihuni oleh 12.549 orang. Kepadatan Kota Surakarta tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari aspek persebaran penduduk di setiap kecamatan, paling padat adalah Kecamatan Pasar Kliwon (17.429/Km<sup>2</sup>), diikuti Kecamatan Serengan (16.657 km<sup>2</sup>), Kecamatan Banjarsari (11.842 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Laweyan (11.341 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Jebres (11.299 Km<sup>2</sup>).

Peningkatan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Surakarta perlu mendapat perhatian, terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan pembangunan. Apabila ke tiga aspek tersebut diacuhkan, berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang dapat beresiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.

Salah satu penyebab kepadatan penduduk tinggi karena faktor daya tarik lingkungan sosial ekonomi kota Surakarta. Kepadatan penduduk berimplikasi pada kebijakan rasio penyediaan fasilitas pelayanan publik dan alokasi sumber daya publik. Sebagai contoh: rasio fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk, rasio fasilitas pendidikan, rasio petugas Linmas, fasilitas sanitasi publik, pengelolaan persampahan, penyediaan perumahan vertikal dan sebagainya. Kepadatan penduduk per kecamatan menjadi pertimbangan komponen indeks penentuan pagu anggaran pembangunan berbasis wilayah. Rasio cakupan pelayanan sanitasi dasar juga harus diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, untuk mengurangi resiko kejadian penyakit menular.

### 3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis (yang meliputi kelahiran, kematian dan migrasi) serta faktor non demografi (seperti kesehatan dan tingkat pendidikan). Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

**Tabel IV. 3. Angka Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2014**

Kecamatan	Pddk Tahun 2013		Pddk Tahun 2014		Angka Pertumbuhan Penduduk
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laweyan	101.324	17,98%	97.990	17,73%	-3,35%
Serengan	54.334	9,64%	53.135	9,61%	-2,23%
Pasar Kliwon	85.609	15,19%	84.010	15,20%	-1,89%
Jebres	143.995	25,55%	142.136	25,72%	-1,30%
Banjarsari	178.397	31,65%	175.379	31,73%	-1,71%
<b>Total</b>	<b>563.659</b>	<b>100,00%</b>	<b>552.650</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,97%</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

Laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta tahun 2014 diperoleh angka negatif. Hal ini disebabkan adanya persoalan teknis administratif. Penurunan jumlah penduduk dari tahun 2013 ke tahun 2014 merupakan kondisi yang dihasilkan dari penyempurnaan sistem

Administrasi Kependudukan secara terintegrasi mulai dari SIAK yg digunakan untuk pelayanan Adminduk, Konsolidasi Nasional & program KTP-elektronik yang menjamin ketunggalan NIK penduduk, serta metode pembersihan database kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Semua proses tersebut berdampak pada data ganda kependudukan Kota Surakarta dengan Kab / Kota / Provinsi lain dan data tidak valid tersingkirkan. Akibatnya, data jumlah penduduk Tahun 2014 dari data kependudukan hasil pembersihan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 semester 2 lebih kecil daripada data jumlah penduduk Tahun 2013 dari database pelayanan.

Jika merujuk pada BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, kota Surakarta termasuk tiga besar kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah, dibawah di rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (1,92).

## B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

### 1. Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin, Piramida Penduduk, dan Rasio Ketergantungan

Jumlah dan proporsi penduduk kota Surakarta menurut umur dan jenis kelamin digambarkan pada tabel IV.3. berikut ini.

**Tabel IV. 4. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2014**

No	Kelompok Umur	LK	%	PR	%	JML	%	Kumulatif	RJK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	0-4	19.342	7.08%	18.555	6,64%	37.897	6,86%	37.897	1,04
2	5 - 9	21.569	7.90%	20.207	7,23%	41.776	7,56%	79.673	1,07
3	10 -15	21.748	7.97%	20.937	7,49%	42.685	7,72%	122.358	1,04
4	15-19	21.294	7.80%	20.487	7,33%	41.781	7,56%	164.139	1,04
5	20-24	20.599	7.54%	20.189	7,22%	40.788	7,38%	204.927	1,02
6	25-29	20.567	7.53%	20.426	7,31%	40.993	7,42%	245.920	1,01
7	30-34	24.295	8.90%	24.214	8,66%	48.509	8,78%	294.429	1,00
8	35-39	23.015	8.43%	22.950	8,21%	45.965	8,32%	340.394	1,00
9	40-44	20.613	7.55%	21.384	7,65%	41.997	7,60%	382.391	0,96
10	45-49	19.758	7.24%	21.236	7,59%	40.994	7,42%	423.385	0,93
11	50-54	17.060	6.25%	19.060	6,82%	36.120	6,54%	459.505	0,90
12	55-59	14.842	5.44%	16.055	5,74%	30.897	5,59%	490.402	0,92
13	60-64	11.404	4.18%	11.421	4,08%	22.825	4,13%	513.227	1,00
14	65-69	6.336	2.32%	7.448	2,66%	13.784	2,49%	527.011	0,85
15	70-74	4.623	1.69%	6.153	2,20%	10.776	1,95%	537.787	0,75
16	>75	5.973	2.19%	8.890	3,18%	14.863	2,69%	552.650	0,67
TOTAL		273.038	100,00%	279.612	100,00%	552.650	100,00%		0,98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

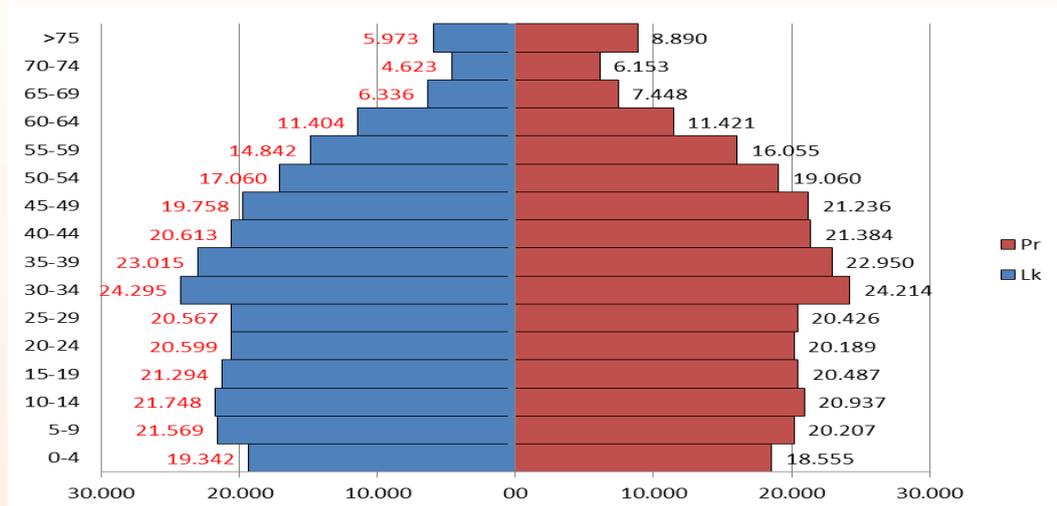
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di kota Surakarta tahun 2014 sebesar 0.98, artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki, berarti proporsi perempuan lebih besar.

Proporsi perempuan lebih besar berimplikasi pada kebijakan pembangunan berperspektif gender. Tantangan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (*Gender Empowerment Index*). Wanita merupakan sumber daya yang cukup potensial untuk mensukseskan program-program pembangunan. Meningkatkan peluang wanita memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dalam memperbaiki kemampuan ekonomi, dapat menekan jumlah kelahiran. Peningkatan pendidikan berarti akan menunda usia perkawinan. Sedangkan kesibukan wanita dalam rangka memperbaiki kemampuan ekonomi akan berpengaruh terhadap jumlah anak dalam setiap keluarga. Dengan demikian total usia reproduksi semakin sempit. Hal ini akan ikut mempertahankan fertilitas pada tingkat yang rendah, sehingga membantu upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan karena kelahiran. Selain itu, tingkat pendidikan wanita juga cenderung berhubungan secara negatif dengan angka mortalitas, terutama mortalitas bayi dan ibu. Kebijakan afirmatif Kota Surakarta untuk memperluas akses perempuan mendapatkan peluang peningkatan pendapatan akan membantu mengurangi angka rasio ketergantungan penduduk Kota Surakarta, berarti meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan afirmatif pemerintah untuk meningkatkan peluang perempuan pada posisi pengambil keputusan di ranah jabatan publik, akan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) Kota Surakarta.

Rasio Jenis Kelamin (RJK) penduduk Kota Surakarta pada kelompok usia lansia  $65 \leq$  tahun sebesar 0,75, lebih rendah dibandingkan RJK rata-rata (0,98), artinya jumlah perempuan usia lanjut di kota Surakarta jumlahnya lebih banyak dibanding jumlah rata-rata dari semua kelompok umur. Hal ini menandakan Usia Harapan Hidup perempuan di Kota Surakarta lebih tinggi dibanding kelompok usia laki-laki. Pada kelompok usia 40 tahun ke atas jumlah perempuan lebih besar, hal ini mengindikasikan kemungkinan jumlah kepala keluarga perempuan di Kota Surakarta banyak. Dalam indikator kesejahteraan sosial, posisi kepala keluarga perempuan menjadi kelompok sasaran khusus penerima manfaat program bantuan sosial.

Dari tabel IV.4. proporsi usia 10 - 20 tahun sebesar 84446 (15,2%). Kelompok usia ini sering disebut sebagai usia remaja. Remaja adalah aset sumber daya manusia yang merupakan tulang punggung penerus generasi bangsa di masa mendatang. Remaja adalah mereka yang berusia 10-20 tahun, dan ditandai dengan perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuh, fungsi tubuh, psikologi dan aspek fungsional. Dari segi umur remaja dapat dibagi menjadi remaja awal (10-13 tahun), remaja menengah (14-16 tahun) dan remaja akhir (17-20 tahun). Kelompok ini perlu mendapat perhatian khusus untuk pengembangan kualitasnya melalui kebijakan pendidikan dan kebijakan kesehatan.

Komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk dapat digambarkan secara grafik dalam bentuk piramida penduduk. Faktor-faktor yang memiliki struktur umur penduduk adalah fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Jika digambarkan dalam bentuk piramida penduduk, Kota Surakarta sebagai berikut.



Gambar IV.1. Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2014

Piramida penduduk kota Surakarta tahun 2014 berbentuk sarang tawon kuno (*old fashioned beehive*). Terdapat pada negara dengan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah. Karakteristik yang dimiliki piramida ini yaitu umur median sangat tinggi, dengan beban tanggungan sangat rendah, terutama pada kelompok umur-umur tua.

Struktur Umur Median (*Median Age*) Kota Surakarta tahun 2014 adalah 33,77 (34) tahun, artinya setengah dari penduduk Kota Surakarta berusia di bawah 34 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 34 tahun. Umur median Kota Surakarta terletak diantara 30–40 tahun, sehingga penduduk Kota Surakarta dikategorikan sebagai penduduk tua. Struktur umur penduduk dikatakan tua apabila kelompok umur mudanya sebanyak 30% atau kurang sementara kelompok umur tuanya lebih besar atau sama dengan 10%.

Penduduk Kota Surakarta saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif, terutama penduduk pada usia 30-39 tahun. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa kedepan nanti, penduduk Kota Surakarta sedang mengarah pada struktur penduduk tua. Bagian tengah piramida membengkak, hal ini menandakan migrasi (semestinya terjadi di kelompok usia dewasa) masuk lebih besar dibandingkan dengan migrasi keluar.

Pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial-

ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga ke institusi. Apabila keadaan ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan menjadi bertambah berat.

Penduduk berumur dibawah 0-4 tahun rendah, diduga karena penurunan tingkat kelahiran, sedangkan jumlah penduduk usia 5 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 0-4 tahun, diduga karena adanya penurunan tingkat kematian bayi.

Kelompok usia 10-19 tahun, sebesar 84.466 jiwa (15%) perlu perhatian khusus di bidang pendidikan untuk mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah atas terkait kebijakan nasional Wajib Belajar 12 tahun. Perhatian khusus untuk derajat kesehatan dan kecakapan ketrampilan kerja sebagai modal bersaing di pasar tenaga kerja. Kelompok usia ini merupakan kelompok strategis menyongsong Bonus Demografi tahun 2020, dan era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), mereka harus bersaing bebas dengan angkatan kerja dari seluruh negara ASEAN, memperebutkan peluang dunia kerja. Kelompok usia ini perlu diberi pelayanan pendidikan dan kesehatan terbaik supaya kelak pada masa bonus demografi mereka dapat memenangkan persaingan kerja, sehingga mengurangi rasio ketergantungan, dan meningkatkan pendapatan per kapita income, mengurangi angka kemiskinan.

Di era MEA, kelompok usia 20-29 tahun, sebesar lebih dari 81.781 (15%) perlu mendapat perhatian khusus terkait kebutuhan lapangan pekerjaan, dan kecakapan bertahan hidup untuk menciptakan pendapatan ekonomis bagi dirinya sendiri. Kebijakan ketenagakerjaan daerah diupayakan memonitor hingga outcome rasio angkatan kerja yang terserap di pasar kerja.

Pada tahun 2014, penduduk Kota Surakarta yang memiliki usia di atas 64 tahun sebesar 39.425 (0,07%). Menurut BPS, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Surakarta pada tahun 2013 sebesar 72,75 dan pada tahun 2012 sebesar 72,35, tertinggi di Jawa Tengah dengan usia 72,75 tahun, dan melampaui UHH rata-rata provinsi Jawa Tengah, yaitu 71.71 tahun. Kondisi ini berimplikasi pada kebijakan alokasi anggaran daerah untuk program kegiatan kesehatan lansia dan kebijakan jaminan sosial lansia.

Struktur penduduk menurut umur juga menginformasikan besarnya tanggungan hidup bagi kelompok usia produktif. Dari kelompok usia produktif dan non produktif sebagai berikut.

**Tabel IV. 5. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2014**

Kelompok Umur	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jml Penduduk	% total penduduk	% Rasio Ketergantungan per kelompok	% Rasio Ketergantungan Total
0-14 (umur muda)	62.659	0,51	59.699	0.49	122.358	0,22	0.31	41.0
15-64 (umur produktif)	193.447	0,49	197.422	0.51	390.869	0,71		
>64 (umur tua)	16.932	0,43	22.491	0.57	39.423	0,07	0.10	
<b>Jumlah</b>	<b>273.080</b>		<b>279.612</b>		<b>552.650</b>			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

Rasio ketergantungan total penduduk Kota Surakarta sebesar 41 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 31% disumbangkan oleh rasio penduduk muda dan rasio penduduk tua menyumbang 10 %. Angka ketergantungan ini termasuk rendah, dibanding rasio ketergantungan provinsi Jawa Tengah sebesar 49 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013). Rasio ketergantungan penduduk Kota Surakarta termasuk rentang dalam Bonus Demografi, karena rasionya kurang dari 44 per 100 orang usia produktif.

## 2. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, terutama upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga.

**Tabel IV. 6. Jumlah Penduduk menurut Status Kawin di Kota Surakarta Tahun 2014**

STATUS	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	134.834	49,38	116.967	41,83	251.801	45,56
Cerai Hidup	2815	1,03	4962	1,77	7777	1,41
Cerai Mati	5830	2,14	25263	9,04	31093	5,63
Kawin	129559	47,45	132420	47,36	261979	47,40
Jumlah	273038	100,00	279612	100,00	552650	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

**Tabel IV. 7. Distribusi Penduduk menurut Status Kawin dan Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2014**

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Angka Perkawinan kasar	Angka Perkawinan Umum
	Jumlah Penduduk tengah tahun	Status Kawin	Umur >= 15		
Laweyan	98,588	46456	88234	471.21	526.51
Serengan	53,298	24875	47750	466.72	520.94
Pasar kliwon	83,758	39485	75139	471.42	525.49
Jebres	141,486	68157	127887	481.72	532.95
Banjarsari	174,988	83006	157334	474.35	527.58
Jumlah	552,118	261979	496344	474.50	527.82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

**Status Kawin** dari tabel IV.6. di atas terlihat bahwa kota Surakarta didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni 47,44%. Hal ini terlihat baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Proporsi penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Laki-laki dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga, sehingga mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

**Status cerai hidup dan cerai mati** memberi informasi bahwa proporsi penduduk perempuan berstatus cerai hidup (1,77%) lebih besar daripada laki-laki (1,03%). Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian perempuan secara ekonomi dan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, membuat perempuan lebih berani mengambil resiko perceraian.

**Cerai Mati**, memberi informasi bahwa di kota Surakarta tahun 2014, penduduk dengan status janda (9,04%) lebih besar daripada status duda (2,13%). Hal ini mengindikasikan status kesehatan perempuan di Kota Surakarta lebih baik, sehingga usia harapan hidup perempuan lebih besar, dan resiko kematian laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Dari tabel IV.&. diketahui **Angka Perkawinan Kasar** Kota Surakarta tahun 2014 sebesar 474,50. Artinya, di Kota Surakarta pada tahun 2014 dari 1.000 penduduk terdapat 474 penduduk berstatus kawin atau terjadi peristiwa perkawinan sebanyak 474 kali. Angka Perkawinan Umum (AKU) Kota Surakarta sebesar 527,82. Artinya dari 1.000 penduduk Kota Surakarta yang berusia 15 tahun keatas terdapat 527 penduduk berstatus kawin atau terjadi 527 peristiwa perkawinan.

**Tabel IV. 8. Angka Perkawinan Spesifik Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2014**

Umur	BELUM KAWIN			KAWIN			JML		Angka Perkawinan Spesifik	
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	LK	PR
<15	53695	50512	104207	0	0	0	53695	50512	0,00	0,00
15-19	21530	20607	42137	17	105	122	21547	20712	0,79	5,07
20-24	20818	17781	38599	766	2860	3626	21584	20641	35,49	138,56
25-29	14734	9561	24295	5415	10528	15943	20149	20089	268,75	524,07
30-34	9354	4546	13900	14696	19381	34077	24050	23927	611,06	810,01
35-39	5377	2957	8334	18665	21036	39701	24042	23993	776,35	876,76
40-44	3167	2248	5415	18220	19659	37879	21387	21907	851,92	897,38
45-49	2016	2005	4021	18291	19565	37856	20307	21570	900,72	907,05
50-54	1224	1631	2855	16667	18455	35122	17891	20086	931,59	918,80
>55	1905	3242	5147	46523	52359	98882	48428	55601	960,66	941,69
Jumlah	133820	115090	248910	139260	163948	303208	273080	279038	509,96	587,55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, SIAK Tahun 2014, diolah

### Angka Perkawinan Spesifik (Angka Perkawinan Menurut Umur dan Jenis Kelamin)

menginformasikan perbandingan perkawinan antar kelompok umur dan antar jenis kelamin. Dari tabel IV.8. diketahui Angka Perkawinan Spesifik tahun 2014, untuk laki-laki usia 15-19 di kota Surakarta sebesar 0.79. Artinya dari 1.000 penduduk laki-laki berusia 15-19 tahun hanya 1 orang yang berstatus kawin. Pada kelompok perempuan usia 15-19 tahun Angka Perkawinan Spesifiknya sebesar 5,07. Artinya dari 1.000 penduduk perempuan berusia 15-19 tahun di Kota Surakarta terdapat 5-6 orang berstatus kawin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cepat menikah dibandingkan laki-laki.

Data ini berimplikasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta masih perlu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah bagi anak perempuan, sehingga tidak cepat memasuki usia pernikahan dini. Selain itu, sosialisasi budaya kesetaraan dan keadilan gender di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan supaya perempuan juga punya kemauan dan mendapat kesempatan setara dengan anak laki-laki untuk mengembangkan potensinya sebagai sumberdaya pembangunan. Berikut dipaparkan data Angka Perceraian Penduduk Kota Surakarta.

**Tabel IV. 9. Angka Perceraian Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2014**

Kecamatan	Status Cerai Hidup	Jumlah Penduduk		Angka Perceraian Umum	Angka Perceraian Kasar
		Umur >= 15	Pertengahan Tahun		
Laweyan	1.331	76.619	97.990	17,37	13,58
Serengan	815	41.542	53.135	19,62	15,34
Pasar Kliwon	1.204	64.971	84.010	18,53	14,33
Jebres	2.000	110.834	142.136	18,05	14,07
Banjarsari	2.427	136.272	175.379	17,81	13,84
Jumlah	7.777	430.238	552.650	18,08	14,07

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

Merujuk Tabel IV.9, **Angka Perceraian Kasar** memberikan gambaran sosiologis Kota Surakarta yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka Perceraian Kasar Kota Surakarta berada pada angka 14,07. Artinya dari 1.000 penduduk terjadi peristiwa perceraian sebanyak 14 kali. Penyebab perceraian dapat dirujuk sebagai bagian urusan pemerintah bagian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan dinas sosial, karena perceraian menjadi salah satu fenomena masalah sosial.

**Angka Perceraian Umum**, menginformasikan status angka perceraian pada kelompok umur di atas 15 tahun. Angka Perceraian Umum Kota Surakarta menginformasikan dari 1.000 penduduk yang berusia 15 tahun keatas terjadi perceraian sebanyak 18 kali atau dari 1.000 penduduk Kota Surakarta terdapat 18 orang yang melakukan perceraian.

### 3. Profil Kependudukan dari Aspek Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

#### a. Jumlah Penduduk menurut Kepala Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dan kepala keluarga dalam satu rumah tangga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan penduduk. Rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga terkait dengan tantangan beban ketergantungan keluarga. Diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga, akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Diasumsikan pula jika dalam satu rumah tangga terdiri dari lebih dari satu keluarga, menunjukkan kondisi kesejahteraan yang kurang ideal, karena terkait dengan kecukupan daya dukung dan daya tampung lingkungan rumah tangga.

**Tabel IV. 10. Jumlah Penduduk menurut Kepala Keluarga di Kota Surakarta Tahun 2014**

NO	KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Rata-rata Jml Anggota Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KEC. LAWEYAN	97.990	30.167	3,25
1	PAJANG	23.816	7.307	3,26
2	LAWEYAN	2.046	658	3,11
3	BUMI	6.037	1.850	3,26
4	PANULARAN	9.016	2.791	3,23
5	PENUMPING	3.953	1.237	3,20
6	SRIWEDARI	4.137	1.211	3,42
7	PURWOSARI	10.069	3.125	3,22
8	SONDAKAN	11.770	3.684	3,19
9	KERTEN	9.087	2.846	3,19
10	JAJAR	8.790	2.682	3,28
11	KARANGASEM	9.269	2.776	3,34
II	KEC. SERENGAN	53.135	16.737	3,17
1	JOYOTAKAN	7.562	2.364	3,20
2	DANUKUSUMAN	10.026	3.111	3,22
3	SERENGAN	10.691	3.386	3,16
4	TIPES	11.806	3.753	3,15
5	KRATONAN	5.352	1.690	3,17
6	JAYENGAN	3.969	1.228	3,23
7	KEMLAYAN	3.729	1.205	3,09

NO	KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Rata-rata Jml Anggota Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III	KEC. PASAR KLIWON	84.010	25.477	3,30
1	JOYOSURAN	10.456	3.260	3,21
2	SEMANGGI	34.790	10.252	3,39
3	PASAR KLIWON	5.316	1.571	3,38
4	GAJAHAN	3.837	1.200	3,20
5	BALUWARTI	6.216	1.933	3,22
6	KAMPUNG BARU	3.017	912	3,31
7	KEDUNG LUMBU	5.342	1.659	3,22
8	SANGKRAH	12.564	3.925	3,20
9	KAUMAN	2.472	765	3,23
IV	KEC. JEBRES	142.136	43.801	3,25
1	KEPATIHAN KULON	2.305	763	3,02
2	KEPATIHAN WETAN	2.506	806	3,11
3	SUDIROPRAJAN	3.808	1.245	3,06
4	GANDEKAN	9.373	2.846	3,29
5	SEWU	7.228	2.260	3,20
6	PUCANGSAWIT	13.529	4.124	3,28
7	JAGALAN	11.982	3.747	3,20
8	PURWODININGRATAN	4.920	1.574	3,13
9	TEGALHARJO	4.844	1.543	3,14
10	JEBRES	32.518	10.067	3,23
11	MOJOSONGO	49.123	14.826	3,31
V	KEC. BANJARSARI	175.379	53.596	3,27
1	KADIPIRO	53.544	15.653	3,42
2	NUSUKAN	30.789	9.662	3,19
3	GILINGAN	20.010	6.336	3,16
4	SETABELAN	3.914	1.243	3,15
5	KESTALAN	2.955	982	3,01
6	KEPRABON	3.085	941	3,28
7	TIMURAN	2.759	879	3,14
8	KETELAN	3.373	1.083	3,11
9	PUNGGAWAN	4.146	1.321	3,14
10	MANGKUBUMEN	9.476	2.993	3,17
11	MANAHAN	10.436	3.294	3,17
12	SUMBER	17.473	5.351	3,27
13	BANYUANYAR	13.419	3.858	3,48
	Kota Surakarta	552.650	169.778	3,26

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Surakarta sebesar 3,26 Artinya bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Surakarta berkisar antara 3-4 orang, sesuai norma Keluarga Sejahtera.

**b. Jumlah Penduduk menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga**

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga. Untuk Kota Surakarta status hubungan dengan Kepala Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV. 11. Jumlah Penduduk menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kota Surakarta Tahun 2014**

NO	Status Hubungan	LK	%	PR	%	JUMLAH	%
1	Kepala Keluarga	135.017	49,45%	34.761	12,43%	169.778	30,72%
2	Suami	59	0,02%	0	0,00%	59	0,01%
3	Istri	0	0,00%	118.915	42,53%	118.915	21,52%
4	Anak	125.229	45,87%	109.225	39,06%	234.454	42,42%
5	Menantu	258	0,09%	345	0,12%	603	0,11%
6	Cucu	3.545	1,30%	3.259	1,17%	6.804	1,23%
7	Orang Tua	449	0,16%	2.790	1,00%	3.239	0,59%
8	Mertua	236	0,09%	1.501	0,54%	1.737	0,31%
9	Famili Lain	6.579	2,41%	7.204	2,58%	13.783	2,49%
10	Pembantu	15	0,01%	75	0,03%	90	0,02%
11	Lainnya	1.648	0,60%	1.540	0,55%	3.188	0,58%
<b>JUMLAH</b>		<b>273.038</b>	<b>100,00%</b>	<b>279.612</b>	<b>100,00%</b>	<b>552.650</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah.

Dari 135.017 Kepala Keluarga laki-laki, sebanyak 118.915 KK mempunyai istri atau sebanyak 88% KK laki-laki memiliki istri. Akan tetapi dari 34.761 Kepala Keluarga Perempuan hanya terdapat 59 KK yang memiliki suami, atau sebesar 0,2% KK Perempuan yang memiliki suami. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kondisi tersebut, diantaranya adalah kepala keluarga mempunyai status perkawinan belum kawin, cerai hidup atau cerai mati. Ada pula kemungkinan bahwa suami tidak berada di satu tempat tinggal dengan istri. Tanggungan terbesar Kepala Keluarga adalah anak sebagai keluarga inti, yaitu sebesar 234.454 (42,4%). Selain keluarga inti, keluarga di Kota Surakarta juga menanggung beban *extended family* (cucu, orang tua, mertua, dan famili lain) yang menumpang sebesar 29.354 jiwa (5,3%). *Extended family* berjenis kelamin perempuan sebanyak 16.639 jiwa (3%) lebih banyak menumpang dibanding laki-laki, yaitu sebesar 12.715 (2,3%). Orang tua yang menumpang pada

keluarga anaknya sebesar 3.239 (0,59%), dan 2.790 (86%) dari beban itu adalah orangtua berjenis kelamin perempuan. Mertua yang menumpang pada keluarga menantu sebesar 1.737 (0,31%) dan kebanyakan mertua perempuan (86%). Keluarga yang mempekerjakan pembantu rumah tangga dan tinggal di rumahnya sebesar 0,02%. Cucu yang ikut kekek/neneknya sebesar 1,23%. Famili lain yang menumpang di KK warga Kota Surakarta sebesar 2,49%. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh anak-anak yang ikut bersekolah di wilayah kota Surakarta namun orangtua mereka tinggal di luar wilayah administratif kota Surakarta. Alasannya adalah kualitas pendidikan di Kota Surakarta dianggap baik dan kompetitif.

### c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga diperlukan untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarganya. Penambahan persentase kepala keluarga perempuan dapat menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi dan penyebabnya.

**Tabel IV. 12. Jumlah Kepala Keluarga menurut Umur di Kota Surakarta Tahun 2014**

Umur	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
15-19	182	0,13	125	0,36	307	0,18
20-24	1719	1,27	417	1,20	2136	1,26
25-29	7625	5,65	969	2,79	8594	5,06
30-34	15871	11,75	1517	4,36	17388	10,24
35-39	17762	13,16	1802	5,18	19564	11,52
40-44	17433	12,91	2285	6,57	19718	11,61
45-49	17689	13,10	3098	8,91	20787	12,24
50-54	15901	11,78	3841	11,05	19742	11,63
55-59	14153	10,48	4430	12,74	18583	10,95
60-64	10953	8,11	4291	12,34	15244	8,98
65-69	6056	4,49	3548	10,21	9604	5,66
70-75	5098	3,78	3945	11,35	9043	5,33
>75	4575	3,39	4493	12,93	9068	5,34
<b>Total</b>	<b>135017</b>	<b>100,00</b>	<b>34761</b>	<b>100,00</b>	<b>169778</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Secara umum Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 45-49 tahun, sebanyak 20.799 jiwa (12,31%). Proporsi Kepala Keluarga laki-laki tertinggi berada di kelompok umur 35-39 tahun, sebanyak 17.767 jiwa (13,16%).

Proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur 75 tahun ke atas, sebesar 4.993 jiwa (14,36%). Keberadaan 6,07 persen Kepala Keluarga berumur 75 tahun keatas mengindikasikan umur harapan hidup penduduk di Kota Surakarta tinggi. Data Kepala Keluarga pada kelompok umur di bawah 15 tahun, mengindikasikan kemungkinan salah pendataan, pernikahan dini, atau anak yatim piatu, yang menggantikan orangtuanya sebagai kepala keluarga. Profil kepala keluarga menurut penyebaran wilayah di Kota Surakarta tahun 2014 sebagai berikut.

**Tabel IV. 13. Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2014**

KECAMATAN	Laki-laki	% KK Kecamatan	Perempuan	% KK Kecamatan	Jumlah KK	% total KK Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LAWEYAN	23.781	78,83	6.386	21,17	30.167	0,18
SERENGAN	12.978	77,54	3.759	22,46	16.737	0,10
PASAR KLIWON	20.171	79,17	5.306	20,83	25.477	0,15
JEBRES	35.404	80,83	8.397	19,17	43.801	0,26
BANJARSARI	42.683	79,64	10.913	20,36	53.596	0,32
KOTA	135.017	79,53	34.761	20,47	169.778	1,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Keberadaan kepala keluarga perempuan (kelompok PEKA/Perempuan Kepala Keluarga) ada 20,5%. Kelompok ini perlu perhatian khusus terkait program-program bantuan sosial, karena Perempuan Kepala Keluarga termasuk kategori kelompok rentan terpinggirkan dalam hal akses kebijakan sosial pemerintah. Kepala keluarga perempuan tertinggi berada di kecamatan Serengan (22,46%). Keberadaan kepala keluarga perempuan ini mengindikasikan terjadinya cerai hidup atau cerai mati, serta kemandirian wanita untuk tidak berkeluarga.

#### **d. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin**

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

**Tabel IV. 14. Jumlah Kepala Keluarga menurut Status Kawin di Kota Surakarta Tahun 2014**

STATUS	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	3.238	2,40%	3.757	10,81%	6.995	4,12%
Kawin	124.257	92,03%	6.416	18,46%	130.673	76,97%
Cerai Hidup	2.286	1,69%	3.965	11,41%	6.251	3,68%
Cerai Mati	5.236	3,88%	20.623	59,33%	25.859	15,23%
<b>JUMLAH</b>	<b>135.017</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.761</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.778</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga yang sudah berstatus kawin mempunyai persentase yang paling tinggi yaitu sebanyak 76,97% atau 130.673 jiwa. Sebesar 124.257 jiwa (95,1%) diantaranya adalah kepala keluarga laki-laki dan 6.416 jiwa (4,9%) adalah kepala keluarga perempuan. Kemudian kepala keluarga yang mempunyai persentase terkecil yaitu status cerai hidup sebanyak 6.251 jiwa (3,68%), dimana 2.286 jiwa (36,6%) adalah kepala keluarga laki-laki dan 3.965 jiwa (63,4%) adalah kepala keluarga perempuan. Pada status cerai mati, perbedaan prosentase mencolok antara perempuan 20.623 jiwa (78,8%) dan laki-laki 5.236 (20,2%). Berarti perempuan lebih tinggi daya tahan hidup mandiri sepeninggal suaminya.

#### **e. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan**

Pendidikan terakhir kepala keluarga merupakan jalan akses mendapatkan peluang pendapatan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga, yang berujung pada tingkat kesejahteraan keluarga, yang menjadi inti dari kesejahteraan penduduk suatu wilayah.

Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu jenjang pendidikan kepala keluarga dijadikan salah satu indikator kualitas sosial ekonomi keluarga.

**Tabel IV. 15. Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2014**

PENDIDIKAN	LK	%	PR	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Sekolah	1.065	0,79%	2.354	6,77%	3.419	2,01%
Belum Tamat SD/Sederajat	2.569	1,90%	2.039	5,87%	4.608	2,71%
Tamat SD/Sederajat	23.655	17,52%	10.501	30,21%	34.156	20,12%
SLTP/Sederajat	23.522	17,42%	6.100	17,55%	29.622	17,45%
SLTA/Sederajat	55.276	40,94%	10.057	28,93%	65.333	38,48%
Diploma I / II	1.079	0,80%	204	0,59%	1.283	0,76%
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	8.145	6,03%	1.261	3,63%	9.406	5,54%
Diploma IV/Strata I	17.302	12,81%	2.011	5,79%	19.313	11,38%
Strata II	2.272	1,68%	228	0,66%	2.500	1,47%
Strata III	132	0,10%	6	0,02%	138	0,08%
<b>JUMLAH</b>	<b>135.017</b>	<b>100%</b>	<b>34.761</b>	<b>100%</b>	<b>169.778</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kepala Keluarga mayoritas (38,48%) berpendidikan terakhir SLTA/Sederajat. Dari perbandingan dalam satu kelompok, mayoritas kepala keluarga laki-laki sebesar 55.276 (40,94%) berpendidikan terakhir SLTA/Sederajat, sedangkan mayoritas kepala keluarga perempuan sebesar 10.057 (30,21%) berpendidikan terakhir SD/Sederajat. Secara kasar dapat digambarkan bahwa keluarga yang dikepalai oleh perempuan mempunyai kualitas sosial, ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang lebih rendah dari pada keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Kepala keluarga di kota Surakarta berpendidikan terakhir kurang dari jenjang SLTA cukup besar, yaitu 69.835 (41,1%). Kepala Keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga kemungkinan besar mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya Kepala Keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal. Kelompok ini perlu difasilitasi untuk program kegiatan daerah terkait peningkatan pendapatan keluarga. Informasi ini penting untuk persiapan daya saing penduduk kota Surakarta menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana penduduk kota Surakarta harus bersaing secara bebas dengan tenaga kerja dari negara ASEAN. Dengan bekal pendidikan rendah sangat sulit memenangkan persaingan di sektor formal.

**f. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja**

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

**Tabel IV. 16. Jumlah Kepala Keluarga menurut Status Kerja di Kota Surakarta Tahun 2014**

Kategori Pekerjaan	Jumlah					
	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
Bekerja	127.677	94,56%	19.243	55,36%	146.920	86,54%
Belum/Tidak Bekerja	1.852	1,37%	2.252	6,48%	4.104	2,42%
Pelajar/mahasiswa	440	0,33%	265	0,76%	705	0,42%
Pensiunan	5.048	3,74%	2.251	6,48%	7.299	4,30%
Mengurus Rumah Tangga	0	0,00%	10.750	30,93%	10.750	6,33%
<b>Jumlah</b>	<b>135.017</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.761</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.778</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Sebesar 86,54% Kepala Keluarga sudah bekerja, artinya secara sosial ekonomi memiliki sumber penghidupan untuk keluarganya. Kepala Keluarga perempuan yang bekerja hanya 19.233 jiwa, atau 13,1% persen dari keseluruhan kepala keluarga yang bekerja. Hal ini menyiratkan kecenderungan kondisi ekonomi keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan lebih rendah kemampuannya.

Status kepala keluarga yang belum bekerja sebanyak 1.852 KK, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan data status kepala keluarga yang belum kawin, sebesar 3238 KK. Kepala keluarga yang belum bekerja dan belum kawin ini diduga adalah pencari kerja atau mahasiswa di Kota Surakarta. Kota Surakarta termasuk kota yang memiliki banyak perguruan tinggi, sehingga kemungkinan besar kepala rumah tangga yang berstatus mahasiswa/pelajar ini adalah pendatang yang bersekolah/kuliah di Kota Surakarta. Namun demikian, data ini perlu menjadikan perhatian pemerintah kota Surakarta, karena kepala keluarga berkewajiban menanggung biaya hidup keluarganya. Jika kepala keluarga tidak bekerja maka rentan tingkat kesejahteraan keluarga.

Status perempuan bekerja di Kota Surakarta sebesar 55,36%, lebih tinggi dibandingkan perempuan yang mengurus rumah tangga (30,93%). Hal ini mengindikasikan partisipasi perempuan di bidang ekonomi cukup tinggi, sehingga dapat berkontribusi pada indeks pembangunan *gender* (*Gender Development Index*) Kota Surakarta.

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan menginformasikan jenis-jenis sektor pekerjaan yang berkontribusi pada perekonomian Kota Surakarta. Berikut diskripsi jenis pekerjaan di Kota Surakarta.

**Tabel IV. 17. Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kota Surakarta Tahun 2014**

No	Pekerjaan	LK	PR	JML	No	Pekerjaan	LK	PRP	JML
1	Akuntan	4	1	5	40	Pelaut	61	0	61
2	Anggota DPD	0	1	1	41	Pembantu Rumah Tangga	6	106	112
3	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	10	2	12	42	Penata Busana	3	2	5
4	Anggota DPR-RI	2	0	2	43	Penata Rambut	12	10	22
5	Anggota Kabinet/Kementerian	1	0	1	44	Penata Rias	3	18	21
6	Apoteker	23	14	37	45	Pendeta	224	14	238
7	Arsitek	47	0	47	46	Peneliti	5	1	6
8	Belum/Tidak Bekerja	1.852	2.252	4.104	47	Pengacara	59	6	65
9	Biarawati	0	19	19	48	Pensiunan	5.048	2.251	7.299
10	Bidan	0	17	17	49	Penterjemah	6	0	6
11	Bupati	0	0	0	50	Penyiar Radio	5	0	5
12	Buruh Harian Lepas	12.000	2.602	14.602	51	Penyiar Televisi	1	0	1
13	Buruh Nelayan/Perikanan	4	1	5	52	Perancang Busana	2	0	2
14	Buruh Peternakan	14	2	16	53	Perangkat Desa	2	0	2
15	Buruh Tani/Perkebunan	80	10	90	54	Perawat	71	32	103
16	Dokter	406	42	448	55	Perdagangan	1.180	316	1.496
17	Dosen	620	78	698	56	Petani/Pekebun	107	13	120
18	Guru	1.668	457	2.125	57	Peternak	28	2	30
19	Imam Mesjid	10	0	10	58	Pialang	2	0	2
20	Industri	84	4	88	59	Promotor Acara	2	0	2
21	Juru Masak	19	16	35	60	Psikiater/Psikolog	5	1	6
22	Karyawan BUMD	123	9	132	61	Seniman	179	18	197
23	Karyawan BUMN	792	27	819	62	Sopir	868	0	868
24	Karyawan Honorer	335	28	363	63	Tabib	5	1	6
25	Karyawan Swasta	72.139	8.966	81.105	64	Tentara Nasional Indonesia	686	5	691
26	Kepolisian RI	805	8	813	65	Transportasi	154	3	157
27	Konstruksi	90	0	90	66	Tukang Batu	348	0	348
28	Konsultan	56	3	59	67	Tukang Cukur	27	0	27
29	Lainnya	341	101	442	68	Tukang Gigi	2	1	3
30	Mekanik	265	0	265	69	Tukang Jahit	217	200	417
31	Mengurus Rumah Tangga	0	10.750	10.750	70	Tukang Kayu	215	0	215
32	Nelayan/Perikanan	8	0	8	71	Tukang Las/Pandai Besi	127	0	127
33	Notaris	29	8	37	72	Tukang Listrik	75	0	75
34	Paraji	0	1	1	73	Tukang Sol Sepatu	17	0	17
35	Paranormal	3	0	3	74	Ustadz/Mubaligh	18	0	18
36	Pastor	7	0	7	75	Wakil Walikota	1	0	1
37	Pedagang	3.228	1.327	4.555	76	Walikota	1	0	1
38	Pegawai Negeri Sipil	5.778	636	6.414	77	Wartawan	56	0	56
39	Pelajar/Mahasiswa	440	265	705	78	Wiraswasta	23.906	4.114	28.020
	<b>Jumlah</b>	<b>101.283</b>	<b>27.647</b>	<b>128.930</b>		<b>Jumlah</b>	<b>33.734</b>	<b>7.114</b>	<b>40.848</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Dari jenis pekerjaan, secara umum proporsi terbesar bekerja sebagai karyawan swasta (81.105 orang), disusul dengan wiraswasta (28.020 orang), kemudian buruh harian lepas (14.602 orang). Namun untuk kelompok perempuan, proporsi terbesar sebagai ibu rumah tangga (10.750 orang). Data ini mengindikasikan bahwa peran usaha swasta di Kota Surakarta sangat berkontribusi pada pembentukan pendapatan per kapita penduduk Kota Surakarta. Dengan demikian sektor industri kecil dan perdagangan masih sebagai lahan penyerap tenaga kerja sebagian besar penduduk Kota Surakarta.

#### 4. Penduduk menurut karakteristik sosial

##### a. Karakteristik Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan seseorang untuk memiliki peluang lebih dalam persaingan tenaga kerja. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk semakin tinggi modal dasar pembangunan suatu daerah. Dengan demikian salah satu cara untuk meningkatkan kualitas penduduk agar menjadi modal dasar pembangunan adalah dengan memajukan bidang pendidikan. Dengan kata lain pendidikan sebagai *human investment* merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar jika tidak didukung dengan ketrampilan dan pengetahuan akan menjadi beban. Pertambahan jumlah penduduk usia sekolah setiap tahun merupakan beban berat yang harus dihadapi. Pertambahan penduduk usia sekolah tersebut menuntut tersedianya fasilitas-fasilitas pendidikan (sekolah, guru, buku, dsb). Profil penduduk Kota Surakarta menurut pendidikan sebagai berikut.

**Tabel IV. 18. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2014**

PENDIDIKAN	LK	%	PR	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Sekolah	42.863	15,70%	44.421	15,89%	87.284	15,79%
Belum Tamat SD/Sederajat	29.727	10,89%	31.033	11,10%	60.760	10,99%
Tamat SD/Sederajat	36.000	13,18%	46.848	16,75%	82.848	14,99%
SLTP/Sederajat	42.342	15,51%	41.885	14,98%	84.227	15,24%
SLTA/Sederajat	83.861	30,71%	78.745	28,16%	162.606	29,42%
Diploma I/II	1.488	0,54%	1.978	0,71%	3.466	0,63%
Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	10.742	3,93%	11.388	4,07%	22.130	4,00%
Diploma IV/Strata I	23.298	8,53%	21.591	7,72%	44.889	8,12%
Strata II	2.573	0,94%	1.678	0,60%	4.251	0,77%
Strata III	144	0,05%	45	0,02%	189	0,03%
<b>JUMLAH</b>	<b>273.038</b>	<b>100,00%</b>	<b>279.612</b>	<b>100,00%</b>	<b>552.650</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Dari tabel ini terlihat bahwa penduduk Kota Surakarta 29,42 persen berpendidikan SLTA/ Sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SLTA sebesar 78.745 lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTA. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD untuk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase untuk laki-laki. Akan tetapi, pada jenjang DI/DII/DIII, proporsi perempuan lebih besar lebih tinggi dari proporsi laki-laki yang menamatkan pendidikan jenjang DI sampai DIII. Diduga fenomena ini terkait dengan kebutuhan praktis, dimana perempuan lebih besar masuk jenjang DI/DII karena lebih cepat memasuki dunia kerja. Pada jenjang pendidikan S1 sampai S3, proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok perempuan yang menamatkannya.

Fenomena semakin tinggi jenjang pendidikan maka proporsi perempuan semakin kecil, dan sebaliknya, semakin rendah jenjang pendidikan proporsi perempuan semakin besar, diduga menunjukkan adanya persolan bisa gender. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Kota Surakarta. Implikasinya, kebijakan akses pendidikan tinggi untuk perempuan perlu perhatian lebih banyak.

#### b. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Profil penduduk Kota Surakarta dari agama yang dianut sebagai berikut.

**Tabel IV. 19. Jumlah Penduduk menurut Agama di Kota Surakarta Tahun 2014**

AGAMA	Laweyan		Serengan		Pasarkliwon		Jebres		Banjarsari		Se-KOTA	
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
Aliran Kepercayaan	11	0,01	0	0,00	7	0,01	5	0,00	10	0,01	33	0,01
Budha	149	0,15	221	0,42	174	0,21	549	0,39	349	0,20	1.442	0,26
Hindu	119	0,12	16	0,03	29	0,03	104	0,07	160	0,09	428	0,08
Islam	83.005	84,71	40.058	75,39	73.442	87,42	99.389	69,93	134.626	76,76	430.520	77,90
Katholik	5.584	5,70	4.153	7,82	4.691	5,58	14.544	10,23	11.976	6,83	40.948	7,41
Konghuchu	1	0,00	18	0,03	3	0,00	69	0,05	19	0,01	110	0,02
Kristen	9.121	9,31	8.669	16,32	5.664	6,74	27.476	19,33	28.239	16,10	79.169	14,33
JUMLAH	97.990	100,00	53.135	100,00	84.010	100,00	142.136	100	175.379	100,00	552.650	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 77,90 persen penduduk Kota Surakarta beragama Islam. Agama kedua yang dianut penduduk Kota Surakarta adalah Kristen yakni 14,33 persen, selanjutnya 7,41 persen penduduknya beragama Katholik, dan hanya sebagian kecil yang menganut agama Hindu, Budha, Khonghuchu, serta Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian**

Jumlah Kelahiran Hidup di kota Surakarta tahun 2014 sebanyak 9.811 kelahiran. Jadi angka kelahiran kasar kota Surakarta tahun 2014 dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 552.118, adalah 17,77%. Artinya, dari 1000 penduduk, ada sekitar 17-18 bayi yang lahir.

Sedangkan Jumlah Kematian di kota Surakarta tahun 2014 sebesar 1.855. Jadi angka kematian kasar di Kota Surakarta tahun 2014 adalah 3,36. Artinya, dari setiap 1000 penduduk ada 3-4 orang yang meninggal dalam tahun 2014.

Dengan demikian ada penambahan jumlah penduduk alami dari aspek kelahiran dan kematian sebesar 6.649 jiwa atau sekitar 1,2%. Prosentase penambahan ini termasuk kategori sedang.



# BAB V

## KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Faktor yang Memengaruhi kualitas penduduk suatu daerah antara lain:

**a. Tingkat pendidikan penduduk**

Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, yang menjadi modal mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

**b. Tingkat kesehatan penduduk**

Kesehatan merupakan modal seseorang untuk memulai aktivitasnya. Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatannya.

**c. Tingkat kesejahteraan penduduk**

Pencapaian kesejahteraan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Bab ini membahas kualitas penduduk dengan indikator pentingnya meliputi aspek: kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan mobilitas.

**A. Aspek Kesehatan**

Indikator kesehatan dilihat dari aspek kelahiran dan kematian. Aspek kelahiran menyediakan informasi tentang angka kelahiran menurut umur; angka kelahiran total; dan rasio anak perempuan. Sedangkan aspek kematian menyajikan informasi angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian post neonatal, angka kematian anak, angka kematian balita, dan angka kematian ibu.

**1. Aspek Kelahiran**

**a. Tingkat Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*)**

Tingkat Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*) membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk wanita usia 15-44 atau 15-49 tahun. Ukuran ini lebih cermat karena hanya memasukkan wanita berumur 15-49 tahun atau 15-44 tahun sebagai penduduk yang "*exposed to risk*". Informasi ini berguna bagi para pengambil keputusan dan perencana dalam merencanakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi dan peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak.

Di Kota Surakarta tahun 2014, jumlah perempuan kelompok umur 15-49 tahun adalah 130.231. Jumlah kelahiran hidup ada 8.896. GFR di Kota Surakarta pada tahun 2014 sebesar 68,31. Angka ini berarti dalam tahun 2014 ada 68 bayi yang lahir tiap 1000 perempuan usia subur (15-49 tahun).

GFR berimplikasi kebijakan untuk mengurangi resiko kelahiran pada kelompok usia rawan melahirkan, yaitu usia yang terlalu muda dan usia terlalu tua. Kebijakan penundaan usia kelahiran akan berkait dengan peningkatan partisipasi perempuan pada pendidikan tinggi dan perluasan pasar kerja bagi perempuan.

#### b. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu.

**Tabel V. 1. Rasio Anak dan Perempuan di Kota Surakarta Tahun 2014**

KECAMATAN	Perempuan (15-49) tahun	Anak (0-4 tahun)	CWR
(1)	(2)	(3)	(4)
Laweyan	26.977	3.253	12,06
Serengan	14.336	1.721	12,00
Pasar Kliwon	22.455	2.956	13,16
Jebres	38.820	4.835	12,45
Banjarsari	48.298	5.790	11,99
<b>Kota Surakarta</b>	<b>150.886</b>	<b>18.555</b>	<b>12,30</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

Menurut data di atas terdapat 18.555 anak kelompok usia 0 – 4 tahun di Kota Surakarta pada tahun 2014. Pada saat yang sama, banyaknya penduduk perempuan pada kelompok usia 15 – 49 tahun sebanyak 150.886 jiwa. Dengan demikian, besarnya rasio anak dan perempuan di Kota Surakarta sebesar 12,30. Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 12-13 balita. CWR tertinggi di Kecamatan Pasar Kliwon sebesar 13,16. Indeks ini digunakan untuk mengukur insidensi kelahiran oleh wanita berumur antara 15-49 tahun dalam suatu populasi. Rasio ini menyatakan jumlah balita yang berhasil hidup selama 5 tahun sebelum dilakukan sensus.

## 2. Aspek Kematian

Tingkat kesehatan umumnya dilihat dari besar kecilnya angka kematian, karena kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan membawa implikasi kebijakan peningkatan cakupan sarana dan pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan penyakit menular, serta pemahaman dan kesadaran perilaku sehat masyarakat. Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan di suatu daerah adalah:

### a. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate / IMR / AKB*), Angka Kematian Neonatal (*Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate*), dan Kematian Post Neo-Natal (*Post Neo-Natal Death Rate*)

Angka Kematian Bayi / *Infant Mortality Rate* kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka Kematian Bayi digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Angka Kematian Neonatal (*Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal atau kematian bayi endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor

yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan. Sedangkan Kematian Post Neo-Natal (*Post Neo-Natal Death Rate*) adalah kematian yang terjadi pada bayi yang beumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Berikut disajikan tabel Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*), Angka Kematian Neonatal (*Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate*), dan Kematian Post Neo-Natal (*Post Neo-Natal Death Rate*) Kota Surakarta.

**Tabel V. 2. Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita**

NO	URAIAN JUMLAH	LK	PR	TOTAL
1	Lahir hidup	4,865	4,946	9,811
2	Lahir Mati	7	9	16
3	Kematian Bayi	24	23	47
4	Kematian Neonatal	15	16	31
5	Kematian Post Neo Natal	9	7	16
6	Kematian Anak Balita	12	9	21

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2014,diolah

**Tabel V. 3. Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LK	PR	TOTAL
1	Laweyan	841	881	1,722
2	Serengan	427	461	888
3	Pasarkliwon	795	740	1,535
4	Jebres	1143	1174	2,317
5	Banjarsari	1659	1690	3,349
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,865</b>	<b>4,946</b>	<b>9,811</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2014, diolah

Diketahui jumlah kelahiran di Kota Surakarta pada tahun 2014 sebanyak 9.811 kelahiran hidup. Angka kematian bayi 4.79. Artinya, diantara 1000 kelahiran hidup, ada 4-5 bayi kurang dari 1 tahun meninggal. Dilaporkan angka neonatal sebesar 3.16, artinya, sebanyak 3-4 bayi yang meninggal sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup. Dilaporkan juga angka post neonatal sebesar 1,63, artinya, sebanyak 1 - 2 bayi yang meninggal pada umur antara 1 bulan s/d kurang dari 1 tahun (Post Neo Natal) dari 1.000 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi berimplikasi pada kebutuhan perbaikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan persalinan, dan pendidikan perilaku sehat lingkungan keluarga.

#### b. Kematian Anak

Jumlah anak usia 0-4 tahun pada pertengahan tahun 2014 di Kota Surakarta sebesar 30.388. Kematian anak balita ada 21 kasus. Jadi angka kematian anak 0,55. Artinya, pada tahun 2014 dari 1000 anak usia 0-4 tahun ada 1 kasus kematian. Rendahnya AKABA menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan anak dan balita, sehingga meningkatkan peluang usia harapan hidupnya.

#### c. Angka Kematian Ibu (AKI / Maternal Mortality Rate)

Data kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan dan pengelolaannya dan data kelahiran bayi yang lahir hidup dapat diperoleh dari hasil pencatatan/pendataan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

**Tabel V. 4. Kematian Ibu**

NO	URAIAN JUMLAH	<20 Th	20-30 Th	>30-40 Th	>40 Th	TOTAL	AKI
1	Kematian Ibu	1	1	3	2	7	80,87

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

Di Kota Surakarta pada tahun 2014 terjadi kelahiran (jumlah persalinan) sebanyak 8.656 kelahiran hidup, dan terjadi kasus 7 orang ibu meninggal karena persalinan dan pasca persalinan. Dari data ini diperoleh angka kematian ibu (MMR) sebesar 80,87. Artinya, ada 80-81 kasus kematian ibu dalam 100.000 peristiwa melahirkan.

Kasus terbanyak di kelompok usia 20-30 tahun, karena kelompok usia ini adalah kelompok produktif untuk melahirkan, sehingga probabilitas kasusnya akan lebih banyak. Intervensi program keselamatan ibu melahirkan sangat diperlukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, yaitu: perbaikan zat gizi utama ibu hamil dan pertolongan persalinan tenaga kesehatan,

## **B. Aspek Pendidikan**

Dalam kaitannya dengan fertilitas dan mortalitas, tingkat pendidikan mempunyai hubungan negatif, dalam arti orang yang berpendidikan tinggi cenderung mempunyai anak sedikit dan pendidikan yang tinggi juga akan cenderung menurunkan tingkat kematian bayi dan ibu.

Profil penduduk Kota Surakarta dari aspek pendidikan akan dilihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni; angka penduduk putus sekolah APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sebagai contoh: APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia yang seharusnya pada jenjang pendidikan tertentu yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan sesuai dibagi dengan jumlah penduduk berusia seharusnya pada jenjang tersebut. Misalnya: Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun. Profil penduduk Kota Surakarta menurut Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel V. 5. Angka Partisipasi Kasar dan Angka partisipasi Murni Pendidikan Kota Surakarta

NO	TINGKATAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI dan PEREMPUAN			RASIO	
		Jumlah	APK	APM	Jumlah	APK	APM	Jumlah	APK	APM	APK P><L	APM P><L
I	<b>Jenjang PAUD (TK/TKLB/RA)</b>											
	1.Siswa PAUD (Semua siswa)	8,231	54,87	50,83	8,067	61,70	54141	16,298	58,05	52,50	112,46	107,04
	2.Siswa PAUD (Usia 3-6 tahun)	7,626			7,114			14,74				
	3.Penduduk (Usia 3-6 tahun)	15,002			13,074			28,076				
II	<b>Jenjang SD (SD/SDLB/MI)</b>											
	1.Siswa SD (Semua siswa)	23,968	102,82	93,72	24,282	105,24	100,00	48,25	104,03	96,84	102,36	106,71
	2.Siswa SD (Usia 7-12 tahun)	21,845			23,073			44,918				
	3.Penduduk (Usia 7-12 tahun)	23,310			23,072			46,382				
III	<b>Jenjang SMP (SMP/SMPLB/MTs)</b>											
	1.Siswa SMP (Semua siswa)	13,586	106,32	91,27	11,397	84,73	84173	24,983	95,25	87,92	79,70	92,83
	2.Siswa SMP (Usia 13-15 tahun)	11,664			11,397			23,061				
	3.Penduduk (Usia 13-15 tahun)	12,779			13,451			26,23				
IV	<b>Jenjang SMA (SMA/SMK/SMALB/MA)</b>											
	1.Siswa SMA (Semua siswa)	8,242	67,25	63,00	8,787	63118	58,26	17,029	65109	60,48	93,96	92,48
	2.Siswa SMA (Usia 16-18 tahun)	7,721			8,102			15,823				
	3.Penduduk (Usia 16-18 tahun)	12,256			13,907			26,163				
V	<b>Jenjang PT</b>											
	1.Mahasiswa (Semua mahasiswa)	12,277	45,10	36,16	13,757	44175	34,99	26,034	44,91	35,54	99,23	96,78
	2.Mahasiswa (Usia 19-24 tahun)	9,843			10,758			20,601				
	3.Penduduk (Usia 19-24 tahun)	27,223			30,743			57,966				

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga berdasar BPS-SUSENAS 2013

Secara umum cakupan layanan pendidikan di Kota Surakarta sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Meskipun demikian, masih ditemukan disparitas partisipasi sekolah kelompok perempuan dan kelompok laki-laki pada jenjang SLTP, SLTA, dan Perguruan tinggi.

APK dan APM Kota Surakarta untuk jenjang Sekolah Dasar melebihi 100%, artinya seluruh penduduk siswa yang bersekolah di Kota Surakarta tidak hanya dari dalam kota Surakarta, tetapi juga berasal dari daerah lain. Selisih APM dan APK mengindikasikan adanya kelompok yang lambat jenjang (misalnya tidak naik kelas) atau terlalu cepat melampaui jenjang seharusnya (misalnya: akselerasi atau masuk sekolah pada usia yang lebih muda dari batas umumnya). Sebagai contoh, anak-anak usia diatas 15 tahun tetapi masih sekolah di tingkat SLTP/Sederajat atau sebaliknya adanya siswa yang lebih muda dari usia standar yang masuk jenjang pendidikan SLTP. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut masuk sekolah pada usia yang lebih muda, begitu juga untuk tingkat SD/Sederajat, SLTA/Sederajat. Dengan kata lain perbedaan APM dan APK mengindikasikan proporsi murid yang tinggal kelas atau terlalu cepat sekolah.

### C. Aspek Ekonomi

Bagian ekonomi akan membahas tentang proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk usia 15-64 tahun yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Indikator ini berguna bagi pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia kerja potensial. Jumlah dan proporsi Tenaga Kerja Kota Surakarta disajikan di tabel di bawah ini.

**Tabel V. 6. Proporsi Tenaga Kerja per Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2014**

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk 15 - 64 Tahun)	Jumlah Penduduk	Persentase Tenaga Kerja
1	LAWEYAN	69.378	97.990	70,80%
2	SERENGAN	37.435	53.135	70,45%
3	PASAR KLIWON	58.891	84.010	70,10%
4	JEBRES	101.248	142.136	71,23%
5	BANJARSARI	123.917	175.379	70,66%
	<b>Jumlah</b>	<b>390.869</b>	<b>552.650</b>	<b>70,73%</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

**Tabel V. 7. Jumlah Tenaga Kerja menurut Wilayah Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2014**

KEC	LK	PR	>=15th L	>=15th P	TngKjr L %	TngKjr P %	TOTAL %
LAWEYAN	48,510	50,078	38,199	40,340	78.74	80.55	79.66
SERENGAN	26,185	27,113	20,679	21,850	78.97	80.59	79.79
PASAR KLIWON	41,728	42,030	32,591	33,544	78.10	79.81	78.96
JEBRES	70,156	71,330	55,326	57,097	78.86	80.05	79.46
BANJARSARI	86,501	88,487	67,488	70,935	78.02	80.16	79.10
<b>TOTAL</b>	<b>273,080</b>	<b>279,038</b>	<b>214,283</b>	<b>223,766</b>	<b>78.47</b>	<b>80.19</b>	<b>79.34</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

Di Kota Surakarta tahun 2014 potensi produktif jumlah tenaga kerja rata-rata sebesar 70,73 persen. Jumlah tenaga kerja laki-laki sebesar 214.283 (38,81%) lebih rendah dibanding perempuan (223.766 jiwa/ 40.53%), tersebar merata di 5 kecamatan. Jumlah tenaga kerja ini cukup besar sekitar 40 % dari jumlah penduduknya. Dengan jumlah *manpower* yang sangat besar ini di satu sisi merupakan sebuah modal besar untuk melaksanakan program pembangunan, akan tetapi tenaga kerja yang besar ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban, terjadinya pengangguran, kemiskinan dan sebagainya.

Tidak semua tenaga kerja merupakan angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerja (menganggur) atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

**Tabel V. 8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta Tahun 2014**

Kelompok Umur	Jml Tenaga kerja	Angkatan Kerja			Jml Bukan Angkatan Kerja	APAK (Angka Partisipasi Angkatan Kerja)
		Usia Produktif Yang Bekerja	Usia Produktif Yang Belum/ sedang mencari kerja Bekerja	Jml Angkatan Kerja (Angker)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	41,781	726	2,631	3,357	38,424	8.03
20-24	40,788	9,025	3,001	12,026	28,762	29.48
25-29	40,993	25,621	3,037	28,658	12,335	69.91
30-34	48,509	38,475	2,003	40,478	8,031	83.44
35-39	45,965	37,281	1,125	38,406	7,559	83.55
40-44	41,997	33,425	790	34,215	7,782	81.47
45-49	40,994	32,439	690	33,129	7,865	80.81
50-54	36,120	28,397	550	28,947	7,173	80.14
55-59	30,897	23,489	616	24,105	6,792	78.02
60-64	22,825	16,067	628	16,695	6,130	73.14
<b>Jumlah</b>	<b>390,869</b>	<b>244,945</b>	<b>15,071</b>	<b>260,016</b>	<b>130,853</b>	<b>66.52</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Pada tahun 2014, sebesar 244.945 dari 260.016 angkatan kerja di Kota Surakarta terserap dalam pasar kerja, sebesar 94,2%. Sedangkan sisanya belum bekerja atau masih mencari pekerjaan sebesar 5,8%. Proporsi angkatan kerja yang bekerja tertinggi berada pada kelompok umur 30-34- tahun.

Dari penduduk kelompok usia 15-19 tahun, sebesar 726 (1,7%) sudah bekerja dan sebesar 2,631 (6,3%) sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah, mereka terpaksa berhenti sekolah dan masuk ke pasar kerja. Jika dikelompok ini tidak memperoleh perhatian, maka mereka akan menjadi tenaga kerja yang rendah kualitasnya sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka. Gejala pada kelompok umur ini perlu perhatian pemerintah Kota Surakarta untuk menurunkan persentasenya dimasa yang akan datang, dengan memperluas peluang melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi.

Sementara itu angkatan kerja pra lansia (60-64 tahun) masih ada yang mencari pekerjaan sebesar 628 jiwa atau 2,7%. Sedangkan kelompok pralansia yang masih bekerja sebesar 16,067 (70,4%). Fenomena ini memberi tantangan upaya perencanaan pemberdayaan masyarakat untuk menampung lansia yang masih produktif. Tantangan ini signifikan mengingat peningkatan jumlah lansia akan terus terjadi dimasa yang akan mendatang seiring peningkatan Usia HarapanHidup, sehingga jumlah angkatan kerja pra lanisa produktif juga semakin meningkat.

Indikator untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif diukur dengan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK), yaitu perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh APAK Kota Surakarta sebesar 66,52. Artinya sebesar 66,52 persen penduduk usia 15-64 tahun di Kota Surakarta terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Tidak semua angkatan kerja secara riil sudah bekerja. Perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak/belum bekerja atau mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja, menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, meeka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Surakarta tahun 2014 sebesar 5,8%. Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru sehingga mereka dapat terserap dipasar kerja. Indikator TPT juga berarti menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-trainingpeluang usaha.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

#### D. Aspek Sosial

Bagian ini menyajikan informasi kependudukan dilihat dari: jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang cacat, proporsi penduduk miskin penerima askeskin

##### 1. Pekerja Anak (<15 tahun)

Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi rentan menghasilkan pekerja anak. Dampak negatif apabila anak bekerja ditempat yang memiliki pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Latar belakang pendidikan yang rendah serta ketidakberdayaan pekerja anak sering menjadi penyebab terjerumusnya pekerja anak pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak.

**Tabel V. 9. Jumlah Pekerja Anak Kota Surakarta Tahun 2014**

Jumlah anak berusia 10-14 tahun	Jumlah pekerja anak usia di bawah 15 tahun	% Pekerja Anak (< 15 tahun)
42.685	376	0,88%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

Dari tabel di V.9 terlihat bahwa dari 42.685 anak yang berusia 10-14 tahun di Kota Surakarta, 376 anak atau 0,88 persen sudah bekerja. Masih ditemukannya Pekerja Anak, memerlukan perhatian khusus. Pemerintah bertanggungjawab memberikan hak perlindungan dan kebutuhan dasar anak, terutama dari keluarga fakir miskin dan anak terlantar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya pekerja anak, yaitu :

##### a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan.

### b. Faktor Budaya/Tradisi/Kebudayaan

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Anak diperintahkan bekerja dengan alasan mendapatkan pendidikan untuk **menghadapi kehidupan di masyarakat kelak**.

### c. Faktor pendidikan

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja.

## 2. Proporsi penduduk penyandang cacat

Indikator ini berguna untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang cacat menurut jenis kecacatannya. Data penyandang kecacatan sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus. Informasi ini dapat digunakan pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan fasilitas kepada para penyandang cacat agar bisa melakukan aktifitas yang sama dengan penduduk lainnya. Sebagai contoh: pendirian Sekolah Luar Biasa jika masih berada pada usia sekolah dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai bagi penyandang cacat usia produktif. Data tentang penyandang jenis kecacatan di Kota Surakarta tahun 2014 sebagai berikut.

**Tabel V. 10. Jumlah Penyandang Cacat Menurut Kelompok Umur di Kota Surakarta Tahun 2014**

Umur	JML PDDK	LK	%	PR	%	JML Penyandang Cacat	%
0-4	37.897	0	0,00	2	0,41	2	0,16
5-9	41.776	14	1,87	5	1,02	19	1,53
10-14	42.685	40	5,35	25	5,10	65	5,25
15-19	41.781	57	7,62	35	7,14	92	7,43
20-24	40.788	68	9,09	37	7,55	105	8,48
25-29	40.993	56	7,49	35	7,14	91	7,35
30-34	48.509	59	7,89	44	8,98	103	8,32
35-39	45.965	85	11,36	56	11,43	141	11,39
40-44	41.997	59	7,89	44	8,98	103	8,32
45-49	40.994	80	10,70	37	7,55	117	9,45
50-54	36.120	66	8,82	29	5,92	95	7,67
55-59	30.897	56	7,49	46	9,39	102	8,24
60-64	22.825	31	4,14	30	6,12	61	4,93
65-69	13.784	26	3,48	12	2,45	38	3,07
70-75	10.776	29	3,88	20	4,08	49	3,96
>75	14.863	22	2,94	33	6,73	55	4,44
Jumlah	552.650	748	100,00	490	100,00	1238	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah

**Tabel V. 11. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kecacatan di Kota Surakarta Tahun 2014**

KECACATAN	LK	%	PR	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fisik	210	28,07%	128	26,12%	338	27,16%
Netra/Buta	68	9,09%	64	13,06%	132	10,72%
Rungu/Wicara	112	14,97%	103	21,02%	215	17,47%
Mental/Jiwa	211	28,21%	104	21,22%	315	25,81%
Fisik Mental	42	5,61%	30	6,12%	72	5,48%
Lainnya	105	14,04%	61	12,45%	166	13,34%
<b>JUMLAH</b>	<b>748</b>	<b>100,00%</b>	<b>490</b>	<b>100,00%</b>	<b>1238</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi penyandang cacat di Kota Surakarta sebesar 1.238 jiwa atau 0,23% dari seluruh penduduk kota Surakarta. Meskipun proporsinya sangat kecil tetap harus menjadi perhatian pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan sosial inklusif bagi mereka dan mendidik mereka untuk produktif dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup mereka.

Dari jenis kecacatan, sebesar 338 orang (27,16%) penduduk Kota Surakarta cacat fisik dengan persentase tertinggi pada laki-laki. Selanjutnya penyandang cacat mental/jiwa menempati urutan kedua yakni sebesar 315 orang (25,81 %) dengan persentase tertinggi pada laki-laki. Secara umum kelompok laki-laki lebih banyak menderita kecacatan, padahal secara sosial budaya laki-laki memiliki beban lebih menjadi sumber penghasil pendapatan keluarga. Hal ini memberi tantangan kepada pemerintah membuat kebijakan daerah untuk memberdayakan penyandang cacat mampu mandiri dan produktif.

### 3. Mobilitas

Mobilitas (migrasi) penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Ada 2 macam mobilitas penduduk, yaitu mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) dan mobilitas penduduk permanen (migrasi). Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan yang bersifat tidak tetap/sementara. Sedangkan mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya tarik (pull factor) wilayah lain. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, antara lain karena di daerah tersebut tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran.

Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk dari wilayah lain di sekitarnya, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

**Tabel V. 12 Angka Migrasi Neto per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Migrasi			Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	Angka Migrasi Neto
	Kode	Nama	Masuk	Keluar	Selisih		
1	33.72.01	LAWEYAN	2.828	2.250	578	98588	5,86
2	33.72.02	SERENGAN	1.321	1.042	279	53298	5,23
3	33.72.03	PASAR KLIWON	1.927	1.593	334	83758	3,99
4	33.72.04	JEBRES	3.035	2.668	367	141486	2,59
5	33.72.05	BANJARSARI	4.740	3.430	1.310	174988	7,49
<b>Jumlah</b>			<b>13.851</b>	<b>10.983</b>	<b>2.868</b>	<b>552118</b>	<b>5,19</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

**Tabel V. 13. Jumlah Migrasi Bruto per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Migrasi Masuk		Jumlah Migrasi Keluar		Jumlah Migrasi Bruto	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
1	33.72.01	LAWEYAN	2.828	20,42%	2.250	20,49%	5.078	20,45%
2	33.72.02	SERENGAN	1.321	9,54%	1.042	9,49%	2.363	9,52%
3	33.72.03	PASAR KLIWON	1.927	13,91%	1.593	14,50%	3.520	14,17%
4	33.72.04	JEBRES	3.035	21,91%	2.668	24,29%	5.703	22,96%
5	33.72.05	BANJARSARI	4.740	34,22%	3.430	31,23%	8.170	32,90%
<b>Jumlah</b>			<b>13.851</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.983</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.834</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014, diolah

Dari tabel V.13. tersebut terlihat bahwa banyaknya migrasi masuk dalam 1 tahun adalah 13.851 jiwa. Migrasi masuk terbesar ke wilayah kecamatan Banjarsari. Hal ini diduga karena perkembangan pembangunan wilayah kota diarahkan ke bagian utara, baik perumahan maupun fasilitas publik lainnya.

Sedangkan migrasi keluar sebanyak 10.983 jiwa. Penduduk pindah keluar terbesar dari kecamatan Banjarsari juga. Diduga karena beberapa penduduk terdesak oleh pendatang, atau karena perkembangan fasilitas perdagangan dan industri daerah yang terbatas, seperti Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, maka berpindah untuk pengembangan usaha dan penghidupan mereka.

Angka Migrasi Neto (*nett-migration/Mn*) merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Angka migrasi netto penduduk Kota Surakarta tahun 2014 adalah migrasi netto positif sebesar 5,19. Hal ini menunjukkan migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, dimana setiap 1.000 penduduk Kota Surakarta terdapat 5-6 jiwa migran masuk.

Sementara itu, Mobilitas Non Permanen akan menyajikan informasi tentang jumlah penduduk musiman.

**Tabel V. 14. Data Pelayanan KIPM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) di Kota Surakarta Tahun 2014**

NO	KECAMATAN	2012	2013	2014	JUMLAH
1	Laweyan	67	18	7	92
2	Serengan	56	3	7	66
3	Pasar Kliwon	56	2	3	61
4	Jebres	45	15	6	66
5	Banjarasari	108	25	8	141
	TOTAL	332	63	29	426

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2014, diolah*

Dari tabel V.14. di atas jumlah penduduk yang bermigrasi non permanen di Kota Surakarta pada tahun 2014 sebanyak 29 jiwa. Tujuan migrasi non permanen ini pada umumnya untuk kepentingan sekolah dan mencari pekerjaan.

# BAB VI

## PENERBITAN DAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan menjadi keniscayaan, sebagai bukti status legal seseorang untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dokumen kependudukan merupakan kewajiban Negara untuk memberikan status legal bagi warganya, sekaligus sebagai sumber data kependudukan.

Pemberian dokumen kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk harus melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka. Implikasinya, kualitas pelayanan kependudukan dan kualitas validasi informasi menjadi hal kritis. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi banyak faktor, antara lain: kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan, kualitas pelayanan serta kualitas informasi layanan kependudukan. Meskipun menganut stelsel aktif yang berarti warga menekankan pada keaktifan warga, namun peran pemerintah Kota Surakarta tetap melakukan upaya sosialisasi terus menerus secara luas guna mendorong pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

### 1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Surakarta berguna untuk mengetahui jumlah keluarga dengan profil anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab administratif Kota Surakarta.

**Tabel VI. 1. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kelurahan  
di Kota Surakarta tahun 2014**

No	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga						Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga					
		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Nama	JML	%	JML	%	Kel.	%	JML	%	JML	%	Kel.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>KEC. LAWEYAN</b>													
1	BUMI	1427	77,14	423	22,86	1850	6,13	1427	77,14	423	22,86	1850	6,13
2	BAJARAN	2148	80,09	534	19,91	2682	8,89	2148	80,09	534	19,91	2682	8,89
3	KARANGASEM	2283	82,24	493	17,76	2776	9,20	2283	82,24	493	17,76	2776	9,20
4	KERTEN	2204	77,44	642	22,56	2846	9,43	2204	77,44	642	22,56	2846	9,43
5	LAWEYAN	515	78,27	143	21,73	658	2,18	515	78,27	143	21,73	658	2,18
6	PAJANG	5880	80,47	1427	19,53	7307	24,22	5880	80,47	1427	19,53	7307	24,22
7	PANULARAN	2193	78,57	598	21,43	2791	9,25	2193	78,57	598	21,43	2791	9,25
8	PENUMPING	914	73,89	323	26,11	1237	4,10	914	73,89	323	26,11	1237	4,10
9	PURWOSARI	2431	77,79	694	22,21	3125	10,36	2431	77,79	694	22,21	3125	10,36
10	SONDAKAN	2873	77,99	811	22,01	3684	12,21	2873	77,99	811	22,01	3684	12,21
11	SRIWEDARI	913	75,39	298	24,61	1211	4,01	913	75,39	298	24,61	1211	4,01
	<b>Jumlah</b>	<b>23781</b>	<b>78,83</b>	<b>6386</b>	<b>21,17</b>	<b>30167</b>	<b>100,00</b>	<b>23781</b>	<b>78,83</b>	<b>6386</b>	<b>21,17</b>	<b>30167</b>	<b>100,00</b>
<b>KEC. SERENGAN</b>													
12	DANUKUSUMAN	2407	77,37	704	22,63	3111	18,59	2407	77,37	704	22,63	3111	18,59
13	JAYENGAN	939	76,47	289	23,53	1228	7,34	939	76,47	289	23,53	1228	7,34
14	JOYOTAKAN	1860	78,68	504	21,32	2364	14,12	1860	78,68	504	21,32	2364	14,12
15	KEMLAYAN	905	75,10	300	24,90	1205	7,20	905	75,10	300	24,90	1205	7,20
16	KRATONAN	1272	75,27	418	24,73	1690	10,10	1272	75,27	418	24,73	1690	10,10
17	SERENGAN	2626	77,55	760	22,45	3386	20,23	2626	77,55	760	22,45	3386	20,23
18	TIPES	2969	79,11	784	20,89	3753	22,42	2969	79,11	784	20,89	3753	22,42
	<b>Jumlah</b>	<b>12978</b>	<b>77,54</b>	<b>3759</b>	<b>22,46</b>	<b>16737</b>	<b>100,00</b>	<b>12978</b>	<b>77,54</b>	<b>3759</b>	<b>22,46</b>	<b>16737</b>	<b>100,00</b>
<b>KEC PASAR KLIWON</b>													
19	BALUWARTI	1488	76,98	445	23,02	1933	7,59	1488	76,98	445	23,02	1933	7,59
20	GAJAHAN	907	75,58	293	24,42	1200	4,71	907	75,58	293	24,42	1200	4,71
21	JOYOSURAN	2566	78,71	694	21,29	3260	12,80	2566	78,71	694	21,29	3260	12,80
22	KAMPUNG BARU	689	75,55	223	24,45	912	3,58	689	75,55	223	24,45	912	3,58
23	KAUMAN	576	75,29	189	24,71	765	3,00	576	75,29	189	24,71	765	3,00
24	KEDUNG LUMBU	1290	77,76	369	22,24	1659	6,51	1290	77,76	369	22,24	1659	6,51
25	PASAR KLIWON	1198	76,26	373	23,74	1571	6,17	1198	76,26	373	23,74	1571	6,17
26	SANGKRAH	3165	80,64	760	19,36	3925	15,41	3165	80,64	760	19,36	3925	15,41
27	SEMANGGI	8292	80,88	1960	19,12	10252	40,24	8292	80,88	1960	19,12	10252	40,24
	<b>Jumlah</b>	<b>20171</b>	<b>79,17</b>	<b>5306</b>	<b>20,83</b>	<b>25477</b>	<b>100,00</b>	<b>20171</b>	<b>79,17</b>	<b>5306</b>	<b>20,83</b>	<b>25477</b>	<b>100,00</b>
<b>KEC. JEBRES</b>													
28	GANDEKAN	2242	78,78	604	21,22	2846	6,50	2242	78,78	604	21,22	2846	6,50
29	JAGALAN	2921	77,96	826	22,04	3747	8,55	2921	77,96	826	22,04	3747	8,55
30	JEBRES	8200	81,45	1867	18,55	10067	22,98	8200	81,45	1867	18,55	10067	22,98
31	KEPATIHAN KULON	558	73,13	205	26,87	763	1,74	558	73,13	205	26,87	763	1,74
32	KEPATIHAN WETAN	615	76,30	191	23,70	806	1,84	615	76,30	191	23,70	806	1,84
33	MOJOSONGO	12402	83,65	2424	16,35	14826	33,85	12402	83,65	2424	16,35	14826	33,85

No	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga						Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga					
		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Nama	JML	%	JML	%	Kel.	%	JML	%	JML	%	Kel.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
34	PUCANGSAWIT	3422	82,98	702	17,02	4124	9,42	3422	82,98	702	17,02	4124	9,42
35	PURWODININ GRATAN	1176	74,71	398	25,29	1574	3,59	1176	74,71	398	25,29	1574	3,59
36	SEWU	1817	80,40	443	19,60	2260	5,16	1817	80,40	443	19,60	2260	5,16
37	SUDIOPRAJA	894	71,81	351	28,19	1245	2,84	894	71,81	351	28,19	1245	2,84
38	TEGALHARJO	1157	74,98	386	25,02	1543	3,52	1157	74,98	386	25,02	1543	3,52
	<b>Jumlah</b>	<b>35404</b>	<b>80,83</b>	<b>8397</b>	<b>19,17</b>	<b>43801</b>	<b>100,00</b>	<b>35404</b>	<b>80,83</b>	<b>8397</b>	<b>19,17</b>	<b>43801</b>	<b>100,00</b>
<b>KECAMATAN BANJARSARI</b>													
39	BANYUANYAR	3270	84,76	588	15,24	3858	7,20	3270	84,76	588	15,24	3858	7,20
40	GILINGAN	4874	76,93	1462	23,07	6336	11,82	4874	76,93	1462	23,07	6336	11,82
41	KADIPIRO	13035	83,27	2618	16,73	15653	29,21	13035	83,27	2618	16,73	15653	29,21
42	KEPRABON	691	73,43	250	26,57	941	1,76	691	73,43	250	26,57	941	1,76
43	KESTALAN	743	75,66	239	24,34	982	1,83	743	75,66	239	24,34	982	1,83
44	KETELAN	817	75,44	266	24,56	1083	2,02	817	75,44	266	24,56	1083	2,02
45	MANAHAN	2508	76,14	786	23,86	3294	6,15	2508	76,14	786	23,86	3294	6,15
46	MANGKUBU MEN	2281	76,21	712	23,79	2993	5,58	2281	76,21	712	23,79	2993	5,58
47	NUSUKAN	7599	78,65	2063	21,35	9662	18,03	7599	78,65	2063	21,35	9662	18,03
48	PUNGGAWAN	982	74,34	339	25,66	1321	2,46	982	74,34	339	25,66	1321	2,46
49	SETABELAN	935	75,22	308	24,78	1243	2,32	935	75,22	308	24,78	1243	2,32
50	SUMBER	4311	80,56	1040	19,44	5351	9,98	4311	80,56	1040	19,44	5351	9,98
51	TIMURAN	637	72,47	242	27,53	879	1,64	637	72,47	242	27,53	879	1,64
	<b>Jumlah</b>	<b>42683</b>	<b>79,64</b>	<b>10913</b>	<b>20,36</b>	<b>53596</b>	<b>100,00</b>	<b>42683</b>	<b>79,64</b>	<b>10913</b>	<b>20,36</b>	<b>53596</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>135017</b>	<b>79,53</b>	<b>34761</b>	<b>20,47</b>	<b>169778</b>	<b>100,00</b>	<b>135017</b>	<b>79,53</b>	<b>34761</b>	<b>20,47</b>	<b>169778</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014

Tabel di atas menggambarkan jumlah keluarga di Kota Surakarta sebanyak 169.778 keluarga, yang dikepalai laki-laki sebanyak 135.017 keluarga dan yang dikepalai perempuan sebesar 34.761 keluarga. Kecamatan dengan jumlah keluarga terbesar ada di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 53.596 KK. Kelurahan terbanyak kepala keluarga adalah kelurahan Kadipiro di Kecamatan Banjarsari sebesar 15.653 KK. Cakupan kepemilikan KK ini dihitung dari rekaman aplikasi SIAK, maupun kepemilikan dokumen KK terbitan lama sebelum pemberlakuan SIAK.

## 2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah. KTP ini wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah. KTP dipersyaratkan untuk beragam urusan penduduk yang berkaitan dengan legalitas, sebagai contoh mengurus perkawinan, urusan dengan Bank, mengurus jaminan sosial, dsb.

**Tabel VI. 2. Cakupan Kepemilikan KTP per Kecamatan di Kota Surakarta tahun 2014**

No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Wajib KTP		Jumlah Penduduk Memiliki KTP		Persentase Kepemilikan KTP
		n	%	n	%	
1	LAWEYAN	73.695	17,81%	68.877	17,89%	93,46%
2	SERENGAN	39.995	9,66%	37.471	9,73%	93,69%
3	PASAR KLIWON	62.507	15,10%	57.645	14,97%	92,22%
4	JEBRES	106.684	25,78%	99.956	25,96%	93,69%
5	BANJARSARI	130.971	31,65%	121.161	31,46%	92,51%
	JUMLAH	<b>413.852</b>	<b>100,00%</b>	<b>385.110</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,06%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP sebesar 93,06 %. Kecamatan pasar Kliwon menempati urutan terendah untuk cakupan kepemilikan KTP, sebesar 93,22%. Namun demikian tidak menafikan masih ada penduduk yang belum memiliki KTP, termasuk penduduk yang masih dalam proses mengurus KTP dan belum tercetak.

Meskipun cakupan kepemilikan dokumen KTP sudah tinggi, namun sosialisasi dan kampanye sadar KTP menjadi program prioritas, karena data KTP merupakan data sangat penting untuk tata kelola pemerintahan dan pembangunan kependudukan pada khususnya. Strategi mendekatkan sistem pelayanan KTP kepada penduduk serta penyederhanaan prosedur pelayanan KTP tetap menjadi prioritas rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Nilai penting kepemilikan KTP bagi perlindungan warga negara untuk mengurangi resiko perdagangan manusia dari Negara atau daerah lain ke Kabupaten/Kota / Provinsi yang bersangkutan. KTP juga mempunyai fungsi pertahanan keamanan terutama dalam menghadapi terorisme nasional dan internasional.

### 3. Penerbitan dan Kepemilikan Akta

Akta Pencatatan Sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada pasal 68 disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: (a) kelahiran; (b) kematian; (c) perkawinan; (d) perceraian; (e) pengakuan anak; dan (f). pengesahan anak.

Akta merupakan dokumen legal untuk menunjukkan hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain. Akta kelahiran terkait dengan hak keperdataan orang tua, Akta perkawinan terkait dengan hak keperdataan dengan suami atau istri,

Akta kematian berkaitan dengan hak waris. Jadi dokumen kependudukan Akta juga wajib dimiliki oleh penduduk dalam kaitannya dengan hak keperdataan tersebut.

**a. Akta Perkawinan**

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama sebagai bukti legal perkawinan mereka.

**Tabel VI. 3. Penerbitan Akta Perkawinan Berdasar Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2014**

No	Kecamatan	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	
		n	%
1	LAWEYAN	29.401	17,06%
2	SERENGAN	17.632	10,23%
3	PASAR KLIWON	21.508	12,48%
4	JEBRES	54.039	31,36%
5	BANJARSARI	49.719	28,86%
	<b>Jumlah</b>	<b>172.299</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014

Penerbitan Akta Perkawinan di Kota Surakarta pada tahun 2014 mencapai 172.299. Penerbitan Akta Perkawinan terbanyak di kecamatan Jebres.

**Tabel VI. 4. Penerbitan Akta Perkawinan Penduduk Berstatus Kawin Menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta tahun 2014**

KOTA	Berstatus Kawin Dan Memiliki Akta Perkawinan					
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Kota	%
KOTA SURAKARTA	87086	50,54	85213	49,46	172299	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, DAK2, 2014

Bila dilihat dari jenis kelamin, kepemilikan Akta perkawinan penduduk laki-laki yang sudah menikah lebih besar tinggi (50,54%) dibandingkan penduduk perempuan yang sudah menikah (49,45%). Gejala ini memerlukan perhatian khusus, terutama untuk program perlindungan perempuan, karena kepemilikan Akta pernikahan akan diperlukan pada saat terjadi kasus yang menyangkut hak-hak perdata suami-istri.

Rendahnya data kepemilikan akta perkawinan ini diduga karena masyarakat belum memahami keharusan pencantuman nomor akta perkawinan di formulir F1.01 pada saat pengurusan dokumen kependudukan sehingga terlewatkan pencatatan kepemilikan Akta perkawinan.

#### b. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam Akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya. Dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Kepemilikan Akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, hak waris, pengurus paspor dan dokumen lainnya.

**Tabel VI. 5. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran menurut Waktu Pelaporan di Kota Surakarta tahun 2014**

Akta Kelahiran Umum						Akta Kelahiran Terlambat					
Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
Jml	%	Jml	%	Kota	%	Jml	%	Jumlah	%	Kota	%
1,746	52.20	1,599	47,80	3,345	100	1,042	52.84	930	47,16	1,972	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, DAK2, 2014

Penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan data SIAK Kota Surakarta tahun 2014 sebesar 5.317 buah akta. Warga yang mengurus Akta Kelahiran terlambat lebih kecil persentasenya, yaitu sebanyak 1.972 (37%). Penerbitan Akta Kelahiran memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berkontribusi atas kuantitas dan kualitas rekam data kepemilikan Akta kelahiran anak pada saat mengisi formulir untuk pengurusan dokumen kependudukan secara umum di kelurahan, karena penerbitan akta kelahiran terintegrasi dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Masyarakat sering mengabaikan isian data pada formulir kependudukan secara lengkap karena tidak ingat data nomor registrasi dokumen dan tidak tahu makna integrasi datanya. Keengganan masyarakat mengisi lengkap semua pertanyaan pada form kependudukan menyebabkan rekaman data menjadi kurang valid, sehingga data yang terpublikasikan lebih rendah dibandingkan realitas kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk kepemilikan Akta kelahiran di masyarakat.

Aparat birokrasi sejak dari kelurahan, kecamatan, hingga staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak dari *front office*, operator sampai verifikator, perlu bertindak lebih teliti. Pada saat kepengurusan dokumen kependudukan, petugas administrasi perlu memeriksa kelengkapan pengisian formulir dari masyarakat untuk memastikan bahwa data-data penting terkait penerbitan dokumen kependudukan tidak terlewatkan.

**Tabel VI. 6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menurut Domisili di Kota Surakarta tahun 2014**

Domisili						Luar Domisili					
Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
Jml	%	Jml	%	Kota	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2,570	52.11	2,362	47,89	4,932	100	218	56.62	167	43,38	385	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, DAK2, 2014

Dari aspek domisili sebesar 4.932 pendaftar (93%) Akta kelahiran Kota Surakarta berdomisili di Surakarta, dan hanya 385 (7%) pendaftar Akta kelahiran bagi anak dari warga ber-KTP dari luar kota Surakarta tetapi tinggal di Surakarta. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menurut Domisili, memenuhi amanat UU nomor 24 tahun 2013 yaitu pencatatan dengan asas domisili, artinya hanya penduduk yang tinggal di Surakarta dengan KTP Surakarta yang dicatat pendaftaran Akta kelahiran anaknya. Di Surakarta pencatatan pendaftaran Akta kelahiran berdasar asas domisili baru dilaksanakan sepenuhnya pada bulan Maret 2014. Pendaftaran Akta kelahiran sebelumnya masih menggunakan amanat UU nomor 23 tahun 2006, yaitu menerbitkan akta kelahiran penduduk berdasar peristiwa kelahiran, bukan berdasar asas domisili Surakarta.

### c. Akta Perceraian

Akta Perceraian adalah suatu bukti otentik putusnya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri. Setelah Keputusan Pengadilan Negeri menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, maka perceraianya melalui Keputusan Pengadilan Agama, yang selanjutnya Keputusan Pengadilan Agama tersebut didaftarkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Cerainya. Akta Perceraian dapat diterbitkan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak berdomisili. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pencatatan perceraian dilaksanakan bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha atau yang pencatatan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Tabel VI. 7 Penerbitan Akta Perceraian berdasar Wilayah Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2014**

No	Kecamatan		Jumlah Penerbitan Akta Perceraian	
	Kode	Nama	N	%
1	33.72.01	LAWEYAN	624	16,76%
2	33.72.02	SERENGAN	368	9,88%
3	33.72.03	PASAR KLIWON	316	8,49%
4	33.72.04	JEBRES	1.510	40,55%
5	33.72.05	BANJARSARI	906	24,33%
<b>Jumlah</b>			<b>3.724</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2014

Tabel di atas memaparkan penerbitan Akta Perceraian Kota Surakarta adalah sebesar 3.724. Penerbitan Akta Perceraian terbanyak di kecamatan Jebres, yaitu sebanyak 1.510 (40,55%).

**d. Akta Kematian**

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang merupakan identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh Kepemilikan Akta kematian digunakan untuk pengurusan hak waris, urusan kepegawaian atau Asuransi dan lain sebagainya.

**Tabel VI. 8. Rekapitulasi Jumlah Kematian dan Kepemilikan Akta Kematian di Kota Surakarta Tahun 2014**

NO	BULAN	WNI		WNA	
		TP	MB	TP	MB
1	JANUARI	74	80		
2	PEBRUARI	74	63		
3	MARET	76	91		
4	APRIL	76	95		
5	MEI	69	69		
6	JUNI	67	74		
7	JULI	55	67		1
8	AGUSTUS	67	75		
9	SEPTEMBER	86	88		
10	OKTOBER	71	96		
11	NOPEMBER	82	93		
12	DESEMBER	85	81		
		882	972		
<b>Jumlah Kepemilikan Akta Kematian + WNA</b>		<b>1.855</b>			
<b>Jumlah Peristiwa Kematian</b>		<b>2.521</b>			
<b>Cakupan Kepemilikan Akta Kematian (%)</b>		<b>73,5 %</b>			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, DAK2, 2014 dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kota Surakarta yang memiliki Akta Kematian sebesar 1855, terdiri dari 1854 orang WNI dan 1 orang WNA. Jumlah kejadian kematian yang tercatat sepanjang tahun 2014 sebesar 2.521 jiwa. Jadi cakupan kepemilikan Akta Kematian di Kota Surakarta tahun 2014 sebesar 73,5 persen. Dari kelompok yang memiliki akta kematian, persentase kepengurusan terlambat cukup besar, yaitu sebesar 882 akta dari 1855 pemilikan akta, atau sebesar 47,5 persen. Selebihnya sebesar 972 penduduk (52,5%) mengurus baru. Besarnya angka penduduk yang terlambat mengurus Akta Kematian diduga karena masyarakat cenderung mengurus Akta Kematian jika sudah terbentur pada kebutuhan pengurusan hak-hak warga akibat peristiwa kematian, misalnya mengurus santunan kematian, pembagian warisan, dan peristiwa perdata lainnya. Dengan demikian sepanjang belum ada kebutuhan maka masyarakat cenderung tidak segera mengurus Akta Kematian keluarganya.

**e. Pengakuan, Pengesahan Dan Pengangkatan Anak Dan Peristiwa Penting Lainnya.**

Jumlah Kepemilikan Akta Pengakuan, Pengesahan dan pengangkatan anak dan Peristiwa penting lainnya berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Akta Pengakuan, Pengesahan dan pengangkatan anak dan Peristiwa penting lainnya.

**Tabel VI. 9. Kepemilikan Akta Pengangkatan Anak Dan Peristiwa Penting Lainnya di Kota Surakarta Tahun 2014**

PERISTIWA	JUMLAH PENPENCATATAN
Pengakuan Anak	15
Pengesahan Anak	2
Pengangkatan Anak	14
Peristiwa Penting lainnya	-
Jumlah	31

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, DAK2, 2014*

Dalam tahun 2014 terjadi peristiwa pengakuan anak 15 orang, pengesahan anak 2 orang, dan pengangkatan anak 14 orang. Pencatatan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak menunjukkan kesadaran masyarakat mengurus dasar legalitas peristiwa yang berdampak pada hak keperdataan.

Catatan khusus terkait kepemilikan akta-akta pencatatan sipil (lahir, mati, kawin, cerai) yang ditampilkan dalam profil ini berdasar data publikasi DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri. Berdasar uji petik kajian sampel dari Kelurahan Timuran dan Kelurahan Sangkrah, realitas kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan publikasi resmi dari data kependudukan yang sudah dibersihkan dalam DAK2.

Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran penduduk bahwa pengisian formulir registrasi penduduk itu sangat penting. Hasil kajian menemukan bahwa penduduk sebenarnya memiliki akta-akta pencatatan sipil tersebut namun tidak mencantumkannya saat registrasi / mengurus KK sehingga tidak masuk datanya dalam SIAK. Selain itu, dari verifikasi administratif juga terdapat kasus penduduk sudah mencantumkan atau melampirkan dokumen pencatatan sipil tersebut namun terjadi kesalahan teknis pada saat entry data ke dalam SIAK. Akibatnya tidak terhitung dalam publikasi cakupan kepemilikan dokumen tersebut.

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa masih juga terdapat penduduk yang memang belum memiliki dokumen-dokumen pencatatan sipil tersebut. Dengan demikian tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terutama akta-akta pencatatan sipil. Pendidikan kewargaan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi, sehingga penduduk mendokumentasikan dengan tertib dokumen bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa catatan sipil yang mereka alami, baik pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, maupun mobilitasnya.

Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana rekam data kependudukan perlu diorientasikan pada ketelitian verifikasi formulir supaya konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa. Petugas administrasi kependudukan perlu didorong menjadi juru penerang bagi penduduk untuk melakukan tertib administrasi kependudukan dengan mencantumkan data yang benar, terbaru dan sah.

# BAB VII

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Peningkatan kualitas penduduk diposisikan sebagai indikator *outcome* dari semua program kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bagian ini menyajikan kesimpulan masalah kependudukan yang dihadapi daerah berdasarkan telaahan dan analisis untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

### A. Kesimpulan: Tantangan Profil Kependudukan Kota Surakarta bagi Pembangunan Kota Berwawasan Kependudukan

#### 1. Aspek Kuantitas Penduduk

- a. Peningkatan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Surakarta perlu mendapat perhatian, terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan pembangunan. Apabila ke tiga aspek tersebut kurang diperhatikan, berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang dapat beresiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.
- b. Kepadatan penduduk per kecamatan perlu menjadi pertimbangan komponen indeks penentuan pagu anggaran pembangunan berbasis wilayah, untuk menjaga asas keadilan pembangunan. Kepadatan penduduk berimplikasi pada kebijakan rasio penyediaan fasilitas pelayanan publik dan alokasi sumber daya publik. Sebagai contoh: rasio fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk, rasio fasilitas pendidikan, rasio petugas Linmas, fasilitas sanitasi publik, pengelolaan persampahan, penyediaan perumahan vertikal dan sebagainya.
- c. Proporsi perempuan lebih besar berimplikasi pada pembangunan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan Indek Pembangunan Gender, Indek Pemberdayaan Gender, dan Indek Kesenjangan Gender (*Gender Inequality Index*).

Usia Harapan Hidup perempuan di Kota Surakarta lebih tinggi dibanding kelompok usia laki-laki, hal ini mengindikasikan kemungkinan jumlah kepala keluarga perempuan, terutama pada kelompok berusia lanjut akan lebih besar. Keberadaan kepala keluarga perempuan (kelompok PEKA/Perempuan Kepala Keluarga) ada 20,5%. Kelompok ini perlu menjadi target prioritas kebijakan jaminan sosial di Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan Perempuan Kepala Keluarga termasuk kategori kelompok rentan terpinggirkan dalam akses kebijakan sosial pemerintah, dan menjadi bagian dari Indikator Kesejahteraan Sosial.

- d. Kelompok usia 10-19 tahun di Kota Surakarta tahun 2014 sebesar 15%. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok usia remaja. Kelompok ini perlu perhatian khusus di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mengoptimalkan Bonus Demografi Indonesia pada tahun 2020, dan menyiapkan tenaga kerja berdaya saing di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Di era MEA, kelompok usia 20-29 tahun, sebesar lebih dari 15% perlu mendapat perhatian khusus terkait kebutuhan lapangan pekerjaan, dan kecakapan bertahan hidup untuk menciptakan pendapatan ekonomis bagi dirinya sendiri. Kebijakan ketenagakerjaan daerah diupayakan memonitor hingga *outcome* rasio angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Kelompok penduduk usia 15-24 tahun juga perlu mendapat perhatian khusus pada kesehatan reproduksi remaja. Dalam rangka menjaga kualitas generasi penerus, perlu diigalakkan pendidikan kesehatan reproduksi. Menurut hasil analisis Survey Demografi Kesehatan Indonesia komponen Kesehatan Reproduksi Remaja tahun 2012 menyatakan bahwa tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal cara-cara melindungi diri terhadap risiko kesehatan reproduksi, seperti pencegahan KTD, IMS, dan HIV dan AIDS. Sebagian besar informasi kesehatan reproduksi diperoleh oleh remaja dari sekolah.
- e. Penduduk Kota Surakarta yang memiliki usia di atas 64 tahun sebesar 0,07% dengan Usia Harapan Hidup (UHH) tertinggi di Jawa Tengah, membawa tantangan bagi kebijakan alokasi anggaran daerah untuk program kegiatan kesehatan lansia dan kebijakan jaminan sosial lansia.

- f. Mayoritas kepala keluarga laki-laki sebesar 40,94% berpendidikan terakhir SLTA/Sederajat, sedangkan mayoritas kepala keluarga perempuan sebesar 30,21% berpendidikan terakhir SD/Sederajat. Secara kasar dapat digambarkan bahwa keluarga yang dikepalai oleh perempuan mempunyai kualitas sosial, ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang lebih rendah dari pada keluarga yang dikepalai oleh laki-laki. Fenomena ini juga menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Kota Surakarta. Implikasinya, kebijakan akses pendidikan tinggi untuk perempuan perlu perhatian lebih banyak.
- g. Kepala keluarga di kota Surakarta berpendidikan terakhir kurang dari jenjang SLTA cukup besar, yaitu 41,1%. Kepala Keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga kemungkinan besar mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya Kepala Keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal. Kelompok ini perlu difasilitasi untuk program kegiatan daerah terkait peningkatan pendapatan keluarga. Informasi ini penting untuk persiapan daya saing penduduk kota Surakarta menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana penduduk kota Surakarta harus bersaing secara bebas dengan tenaga kerja dari negara ASEAN. Dengan bekal pendidikan rendah sangat sulit memenangkan persaingan di sektor formal.

## 2. Aspek Kualitas

- a. Pada tahun 2014 di Kota Surakarta ditemukan Angka Kematian Bayi sebesar 4,72 yang berarti terjadi kematian bayi sebanyak 4-5 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka Neonatal sebesar 3,03 berarti terjadi kematian 3 bayi sebelum berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup. Angka Post Neonatal sebesar 1,68 artinya terjadi kematian 1-2 bayi yang beumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Data ini berimplikasi pada perlunya prioritas kebutuhan perbaikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan persalinan, dan pendidikan perilaku sehat lingkungan keluarga.
- b. Dari penduduk kelompok usia 15-19 tahun, sebesar 1,7% sudah bekerja dan sebesar 6,3% sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah, mereka terpaksa berhenti sekolah dan masuk ke pasar kerja. Jika dikelompok ini tidak memperoleh perhatian, maka mereka akan menjadi tenaga kerja yang rendah kualitasnya sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka.

Gejala pada kelompok umur ini perlu perhatian pemerintah Kota Surakarta untuk menurunkan persentasenya dimasa yang akan datang, dengan memperluas peluang melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi.

- c. Sementara itu angkatan kerja pra lansia (60-64 tahun) masih ada yang mencari pekerjaan sebesar 2,7%. Sedangkan kelompok pralansia yang masih bekerja sebesar 70,4%. Fenomena ini memberi tantangan upaya perencanaan pemberdayaan masyarakat untuk menampung lansia yang masih produktif. Tantangan ini signifikan mengingat peningkatan jumlah lansia akan terus terjadi dimasa yang akan mendatang seiring peningkatan Usia Harapan Hidup, sehingga jumlah angkatan kerja pra lansia produktif juga semakin meningkat.
- d. APAK (Angka Partisipasi Angkatan Kerja) Kota Surakarta sebesar 66,52. Angka ini berarti sebesar 66,52 persen penduduk usia 15-64 tahun di Kota Surakarta sudah bekerja atau berusaha mencari pekerjaan dalam kegiatan produktif. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Surakarta tahun 2014 sebesar 5,8%. Data ini relevan untuk kebijakan program ketenagakerjaan dan fasilitasi peluang usaha untuk penyerapan tenaga kerja.
- e. Pada tahun 2014 di Kota Surakarta masih ditemukannya 0,88% Pekerja Anak, memerlukan perhatian khusus. Pemerintah Kota bertanggungjawab memberikan hak perlindungan dan kebutuhan dasar anak, terutama dari keluarga fakir miskin dan anak terlantar. Perhatian khusus pada pekerja anak menjadi keniscayaan menuju Kota Layak Anak.

### **3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

Secara umum, tantangan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan memerlukan intervensi kebijakan di kalangan internal pemerintah kota dan di kalangan penduduk. Pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi, sehingga penduduk mendokumentasikan dengan tertib dokumen bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa catatan sipil yang mereka alami, baik pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, maupun mobilitasnya.

Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana rekam data kependudukan perlu diorientasikan pada ketelitian verifikasi formulir supaya konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa.

Petugas administrasi kependudukan perlu disorong menjadi juru penerang bagi penduduk untuk melakukan tertib administrasi kependudukan dengan mencantumkan data yang benar, terbaru dan sah.

Selain itu, reliabilitas metode pembersihan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri yang menghasilkan DAK2 tidak dapat dipungkiri juga berpengaruh pada hasil akhir pengolahan data kepemilikan dokumen. Begitu juga dengan masa transisi perubahan sistem yang diaplikasikan untuk data administrasi kependudukan mempengaruhi hasil rekaman cakupan kepemilikan dokumen.

Secara khusus, beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen kependudukan sebagai berikut.

- a. Cakupan kepemilikan dokumen KK Kota Surakarta tahun 2014 sebesar 100%. Kepemilikan dokumen KK seringkali menjadi dasar identifikasi kelompok sasaran program jaminan sosial. Pada beberapa kasus, posisi Kepala Keluarga yang dikepalai oleh perempuan rentan terlewatkan untuk akses berbagai program jaminan sosial. Kondisi ini menjadi prioritas pemerintah kota bagi kebijakan penentuan kelompok sasaran jaminan sosial.
- b. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP sebesar 93,06 %, meskipun cakupan kepemilikan dokumen KTP sudah tinggi, namun sosialisasi dan kampanye sadar KTP menjadi program prioritas, karena data KTP merupakan data sangat penting untuk tata kelola pemerintahan dan pembangunan kependudukan pada khususnya. Strategi mendekatkan sistem pelayanan KTP kepada penduduk (mobil keliling) serta penyederhanaan prosedur pelayanan KTP tetap menjadi prioritas rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Masyarakat belum terbiasa mengurus dokumen kependudukan yang menyangkut akta, baik kawin, cerai, kelahiran, dan kematian. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian. Kurangnya kesadaran mengurus kepemilikan Akta -akta tersebut rentan bagi konflik hak-hak perdatanya yang melekat sebagai konsekuensi dari peristiwa perkawinan, perceraian, kelahiran, dan kematian.

#### **4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan**

Manajemen data dan informasi kependudukan menjadi keniscayaan untuk perencanaan pembangunan daerah berwawasan kependudukan.

Tantangan yang dihadapi untuk pengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan di Kota Surakarta sebagai berikut.

1. Koordinasi dan sinkronisasinya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan sesuai dengan indikator kinerja pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD belum optimal. Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan harus dilakukan lintas sektor. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting. Tujuan pembangunan kependudukan antara lain: (1) keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk; (2) pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya; (3) upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk; (4) peningkatan pemahaman serta pengetahuan wawasan kependudukan.
2. Pemahaman masyarakat akan pentingnya akurasi data kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Upaya sosialisasi dan pendidikan warga perlu terus menerus diupayakan hingga level RT/RW supaya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai salah satu upaya jaminan perlindungan negara semakin meningkat. Pemahaman masyarakat akan pentingnya akurasi data kependudukan dirinya dan keluarganya serta kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan supaya mencapai cakupan kepemilikan dokumen mencapai 100%. Semakin tinggi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan membantu semakin baik kualitas data informasi kependudukan. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk: (a) mencatatkan peristiwa kelahiran; (b) mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital (kawin, cerai, mati, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, serta pewarganegaraan); (c) mencatatkan perubahan status kependudukan lainnya (seperti perubahan alamat ataupun perubahan nama).

3. Koordinasi antar lembaga berwenang mengeluarkan dokumen penduduk dan Kantor Pencatatan Sipil perlu terus menerus ditingkatkan. Pelayanan pencatatan perkawinan atau perceraian penduduk yang beragama Islam di KUA atau Pengadilan Agama (Departemen Agama); pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi oleh Departemen Kehakiman dan HAM; pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil belum seluruhnya terkoneksi antar pelayanan tersebut.

4. Pengendalian dan evaluasi validitas dan akurasi ketersediaan data kependudukan Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Perlu diprioritaskan pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk ragam kepentingan dan tujuan intervensi kebijakan perlu dioptimalkan. Apabila sistem informasi data kependudukan terpadu lintas sektor diaplikasikan, akan mempercepat kelengkapan, akurasi, dan uji validitas data kependudukan yang tersedia. Jika hal itu terwujud, maka akan mempermudah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

## **B. Implikasi Kebijakan**

### **1. Kebijakan akurasi dan validasi kependudukan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mengoptimalkan upaya penyajian kelengkapan data kependudukan, akurasi data dan validitas data. Dukungan lintas SKPD sangat menentukan keberhasilan penyajian kelengkapan, akurasi dan validasi data. Kelengkapan, akurasi, dan kebaruan data kependudukan sangat strategis sebagai dasar perencanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

### **2. Kebijakan Pengarusutamaan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menggalakkan sosialisasi pengarusutamaan kependudukan untuk pembangunan daerah kepada seluruh SKPD kota Surakarta. Sosialisasi tentang bagaimana menyajikan data yang terkait dengan unit penduduk yang akurat dan valid serta memanfaatkannya untuk perencanaan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya sadar pentingnya mengurus dan memiliki dokumen kependudukan tepat waktu, sehingga derajat cakupan kepemilikan dokumen pendidikan meningkat.

### **3. Kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk**

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan isu lintas sektoral. Upaya yang perlu dilakukan antara lain: (1) memperpanjang waktu penundaan usia kawin; (2) mengatur jumlah kelahiran; (3) mengurangi angka kematian; dan (4) menjaga keseimbangan struktur penduduk.

Sektor pendidikan perlu meningkatkan angka partisipasi sekolah terutama untuk perempuan. Sektor ketenagakerjaan perlu menyusun program perluasan kesempatan kerja, terutama untuk perempuan. Perempuan pekerja di ranah publik akan berkontribusi pada penundaan usia kawin dan pengendalian jumlah kelahiran dan pengurangan beban ketergantungan rumah tangga, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk. Sektor kesehatan perlu meningkatkan program pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keselamatan ibu melahirkan, kecukupan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kemampuan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin, dan cakupan layanan fasilitas kesehatan secara merata dan terjangkau. Sektor kesehatan berkontribusi menjaga keseimbangan struktur penduduk melalui upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup penduduk.

### **4. Kebijakan Penataan Ruang dan Penyediaan Sarana Prasarana Kota Berwawasan Kependudukan**

Aspek kependudukan ini merupakan memegang peranan penting, karena berkaitan erat dengan upaya-upaya pengembangan dan penyebaran sarana dan prasarana kota di masa yang akan datang. Kebijakan umum pengembangan kependudukan ini meliputi dua hal, yaitu perkiraan (proyeksi) jumlah penduduk di masa yang akan datang dan distribusi kepadatan penduduk. Distribusi kepadatan penduduk artinya distribusi penduduk pada wilayah perkotaan yang sudah ditetapkan. Proyeksi kepadatan maksimal penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu perlu dijadikan rujukan merencanakan daya tampung dan daya dukung wilayah. Pengendalian penyebaran penduduk melalui kebijakan pengaturan wilayah pemukiman penduduk dan model pembangunan perumahan menjadi hal yang urgen.

### **5. Kebijakan Ketahanan Pangan**

Proyeksi pertumbuhan penduduk menjadi pertimbangan untuk perencanaan cadangan pangan daerah dan penyediaan sumber kebutuhan energi protein.

## **6. Kebijakan kesehatan**

Penduduk kota Surakarta tahun 2014 termasuk kategori umur tua, karena umur median penduduk lebih dari 30 tahun, yaitu 34 tahun. Setengah dari penduduk Kota Surakarta pada tahun 2014 berusia di bawah 34 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 34 tahun. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan menyusun kebijakan jaminan kesehatan lansia.

Tantangan Bonus Demografi berimplikasi pada prioritas program dan kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan promotif berorientasi pada kegiatan yang bersifat promosi kebiasaan hidup sehat. Sedangkan Pelayanan kesehatan preventif fokus pada kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan promotif dan kuratif untuk mengurangi resiko angka kesakitan dan angka kematian.

Pelayanan kesehatan promotif dan preventif terutama untuk usia muda, dimaksudkan supaya tumbuh generasi yang sehat dan cerdas. Generasi yang berkualitas tahun 2020-2031(puncak bonus demografi) sangat diperlukan supaya Kota Surakarta memiliki angkatan tenaga kerja yang unggul dan menang berkompetisi di pasar kerja era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

## **7. Kebijakan pendidikan**

Jumlah penduduk usia 10-19 tahun, berjumlah 15%, perlu perhatian khusus sebagai pemanfaatan bonus demografi pada tahun 2020-2031. SKPD yang menangani urusan pendidikan perlu memasukkan kurikulum pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan hidup di jenjang pendidikan dasar sebagai modal bersaing di pasar kerja era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## **8. Kebijakan ketenagakerjaan**

Data tentang angkatan kerja yang belum bekerja menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan memberi input untuk perencanaan kebijakan penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu SKPD yang mengampu urusan ketenagakerjaan perlu menyusun perencanaan kegiatan penanganan pengangguran berbasis data angkatan kerja berdasar kelompok usia dan gender.

## **9. Kebijakan sosial**

Data penduduk menurut kecacatan, perceraian dan perempuan kepala rumah tangga, memberi input bagi kebijakan penanganan penyandang masalah sosial dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.



## Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta 2014

disusun oleh :  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

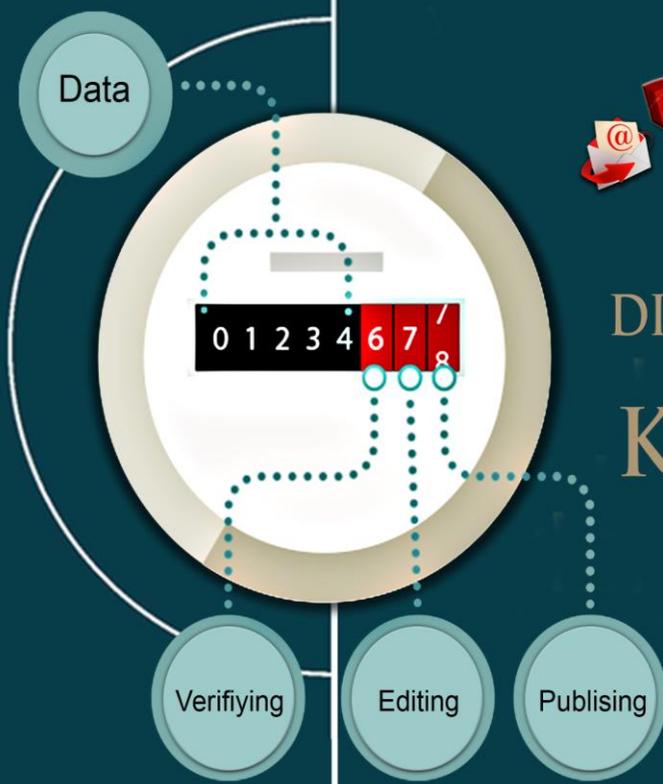
Jl. Jendral Sudirman No. 2 Surakarta, Telp. (0271) 63955, 642020 psw 552,553.

Website : <http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

e-mail: [dispendukcapil@surakarta.go.id](mailto:dispendukcapil@surakarta.go.id)



# PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA SURAKARTA 2014



 <http://dispendukcapil.surakarta.go.id>  
 e-mail : [dispendukcapil@surakarta.go.id](mailto:dispendukcapil@surakarta.go.id)  
 @dispendukcapilsurakarta

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
**KOTA SURAKARTA**

Copyright@disdukcapilsurakarta2015